LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Simalungun. Hal ini juga sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menuju terciptanya ***Good Governance*** dan ***Clean Government***. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Simalungun tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan sarana pelaporan kinerja untuk mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah serta sebagai media pertanggungjawaban kinerja yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian tujuan, sasaran dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 disampaikan, kiranya dapat dievaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Pamatang Raya, Maret 2021

BUPATI SIMALUNGUN,

Dr. J.R. SARAGIH, SH, MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi.....ii

Daftar Tabel iii

Ikhtisar Eksekutif vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

1.3 Gambaran Umum Kabupaten Simalungun 3

1.4 Sistematika Pelaporan 22

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....24

A. Visi Pembangunan Tahun 2016-2021 24

B. Misi Pembangunan Tahun 2016-2021 25

C. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 26

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 32

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2020.....33

B. Capaian Kinerja Keuangan 108

BAB IV PENUTUP.....115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

Tabel 1.2 Luas Wilayah Kabupaten Simalungun Berdasarkan Ketinggian

Tabel 1.3 Luas Wilayah Kabupaten Simalungun Berdasarkan Penyebaran Kemiringan Lahan/Lereng

Tabel 1.4 Klasifikasi Lahan Berdasarkan Penggunaannya

Tabel 1.5 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2019

Tabel 1.6 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan 2019 Kabupaten Simalungun

Tabel 1.7 Perkembangan PDRB Kabupaten Simalungun ADH Berlaku dan ADH Konstan 2016-2019

Tabel 1.8 Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Kontributor Terbesar PDRB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

Tabel 1.9 Peranan PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016-2019 Kabupaten Simalungun

Tabel 1.10 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016 Kabupaten Simalungun

Tabel 1.11 PDRB Per Kapita Simalungun Atas Dasar Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2016-2019

Tabel 1.12 Perkembangan Indikator Pembentukan IPM Tahun 2016-2019 Kabupaten Simalungun

Tabel 1.13 Persentase Penduduk Miskin 2016-2019 Kabupaten Simalungun

Tabel 2.1 Hubungan Hirarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Simalungun Tahun 2020

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Prasarana Jalan, dan Irigasi

Tabel 3.5 Kondisi Jalan Kabupaten Simalungun sampai Tahun 2020

Tabel 3.6 Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2020

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih

Tabel 3.8 Pembangunan Sarana Air Minum Tahun 2016-2020

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Jumlah Kecamatan yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi (32 Kecamatan)

Tabel 3.10 Data Status Puskesmas Kabupaten Simalungun Tahun 2020

Tabel 3.11 Persentase Pasien BPJS Kesehatan Non PBI dan Mandiri

Tabel 3.12 Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2019

Tabel 3.13 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Meningkatnya Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Persentase Pasangan Usia Subur yang Menjadi Akseptor KB

Tabel 3.16 Peserta KB Baru Tahun 2016-2020

Tabel 3.17 Perkembangan Peserta KB Aktif sampai Bulan Desember Tahun 2016-2020

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik dan Sedang (SD,SMP)

Tabel 3.19 Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Kabupaten Simalungun sampai dengan Tahun 2020
Tabel 3.20 Kinerja pengadaan sarana pendidikan SD tahun 2020
Tabel 3.21 Kinerja pengadaan sarana Pendidikan SMP tahun 2020
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Tingkat Kualifikasi Pendidikan Guru
Tabel 3.23 Tingkat Pendidikan Guru S1 A.IV Kabupaten Simalungun Tahun 2020
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Nilai Rata-rata Ujian Nasional (SD/SMP) dan Meningkatnya Melek Aksara
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah
Tabel 3.26 Kinerja Pencapaian Angka Partisipasi PAUD, SD/MI, SMP/MTS tahun 2019/2020
Tabel 3.27 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dan tahun 2020
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Menjamin Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020 dan perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun 2019.
Tabel 3.29 Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.30 Jumlah Izin dan Jenis Perizinan yang Diproses Tahun 2016-2020
Tabel 3.31 Jumlah Pelayanan Dokumen Kependudukan Kabupaten Simalungun
Tabel 3.32 Perbandingan Capaian Kinerja meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berkembangnya Usaha Koperasi/Industri Kecil dan Menengah dan perbandingan kinerja dengan tahun lalu
Tabel 3.34 Perkembangan Koperasi Aktif sampai Tahun 2020

Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dari Sasaran-17

Tabel 3.36 Capaian Kinerja Sasaran 18 tahun 2020 dan perbandingan Kinerja dengan Tahun 2019

Tabel 3.37 Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori/Desa

Tabel 3.38 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Tabel. 3.39 Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan Daerah bidang Pertanian

Tabel 3.40 Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Simalungun 2016-2020

Tabel 3.41 Perkembangan Produksi Jagung,Ubi Kayu, Cabe dan Komoditi Perkebunan Kabupaten Simalungun 2016-2020

Tabel 3.42 Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan Pariwisata

Tabel 3.43 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Bulan Tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Simalungun

Tabel 3.44 Dana Hibah Kabupaten Simalungun Kepada Industri Pariwisata.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 yang mengacu pada Pedoman Penyusunan LAKIP yang diterbitkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang berisikan tentang keberhasilan, kegagalan, kegiatan yang belum sempat dilaksanakan, faktor pendukung keberhasilan dan hambatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Simalungun.

Pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Simalungun tahun 2020 yang diukur melalui LAKIP ini didasarkan atas dokumen RPJMD tahun 2016-2021, Renstra dan Penetapan Kinerja dengan tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 70,94% dengan interpretasi CUKUP.

Dengan mempedomani Indikator Kinerja Utama, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

- Misi 1 terdapat 2 sasaran dan 3 indikator kinerja utama
  Capaian kinerja yaitu sebanyak 2 indikator kinerja dalam kategori Baik, dan 1 indikator dalam kategori Kurang.
- Misi 2 terdapat 5 sasaran dan 6 indikator kinerja utama.
  Capaian kinerja adalah yaitu 4 indikator kinerja dalam kategori Baik, 1 indikator kinerja dalam kategori Cukup, dan 1 indikator kinerja dalam kategori Tidak Terealisasi
- Misi 3 terdapat 5 sasaran dan 7 indikator kinerja utama
  Capaian kinerja yaitu sebanyak 2 indikator kinerja dalam kategori Sangat Baik, 4 indikator kinerja dalam kategori Baik, 1 indikator kinerja dalam kategori Kurang
- Misi 4 terdapat 1 sasaran dan 3 indikator kinerja utama

Capaian kinerja yaitu sebanyak 2 indikator kinerja dalam kategori Baik, 1 indikator kinerja dalam kategori Tidak Terealisasi.

- Misi 5 terdapat 9 sasaran dan 23 indikator kinerja utama.
  Capaian kinerja yaitu sebanyak 1 indikator kinerja dalam kategori Sangat Baik, 13 indikator kinerja dalam kategori Baik, 3 indikator kinerja dalam kategori Cukup, 3 indikator kinerja dalam kategori Kurang, dan 3 indikator kinerja masih *on process.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertangungjawabkan suatu keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sejalan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Hal tersebut dirangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat pula digunakan sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 22 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2020. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh gerak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Simalungun yang tentunya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2006-2021.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2016-2021. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2020 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020;

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun pada Tahun 2020;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3. Gambaran Umum Kabupaten Simalungun.

1.3.1. Geografis.

1. Luas dan Batas Wilayah.

Kabupaten Simalungun secara keseluruhan memliki luas administrasi 4.372,50 km² atau 5,99 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah tersebut, Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten terluas ke-4 setelah Kabupaten Tapanuli Selatan (8,26 persen), Kabupaten Mandailing Natal (8,40 persen) dan Kabupaten Langkat (8,58 persen) di Sumatera Utara (BPS Provinsi Sumut, 2019).

Secara administratif, Kabupaten Simalungun terdiri dari 32 Kecamatan, 386 Nagori (desa) dan 27 Kelurahan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Hatonduhan (7,69 persen) sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi (0,89 persen). Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Simalungun, adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan daerah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan daerah Kabupaten Karo.
5. Sebelah Tengah berbatasan dengan Kota Pematangsiantar.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Nagori	Kelurahan	Luas Wilayah	
		-	-	Km	Persentase
1	Silimakuta	6	1	74,16	1,70
2	Pamatang Silimakuta	10	0	79,68	1,82
3	Purba	13	1	172,71	3,95
4	Haranggaol Horison	4	1	40,97	0,94
5	Dolok Pardamean	11	0	67,90	1,70
6	Sidamanik	14	1	80,88	1,85
7	Pamatang Sidamanik	9	1	137,80	3,15
8	Girsang Sipangan Bolon	3	3	129,89	2,97
9	Tanah Jawa	19	1	174,33	3,99
10	Hatonduhan	9	0	336,26	7,69
11	Dolok Panribuan	15	0	148,62	3,40
12	Jorlang Hataran	12	1	93,70	2,14
13	Panei	16	1	77,96	1,78
14	Panombeian Panei	11	0	73,74	1,69
15	Raya	12	5	261,56	6,53
16	Dolok Masagal	9	0	105,77	2,64
17	Dolok Silou	14	0	302,66	6,92
18	Silau Kahean	16	0	228,74	5,23
19	Raya Kahean	13	1	204,89	4,69
20	Tapian Dolok	10	1	119,89	2,74
21	Dolok Batu Nanggar	14	2	106,91	2,45
22	Siantar	17	0	73,99	1,69
23	Gunung Malela	16	0	96,74	2,21
24	Gunung Maligas	9	0	51,39	1,18
25	Hutabayu Raja	15	1	191,43	4,38
26	Jawa Maraja Bah Jambi	8	0	38,97	0,89
27	Pamatang Bandar	11	2	88,16	2,02
28	Bandar Huluan	10	0	107,33	2,45
29	Bandar	14	2	100,69	2,30
30	Bandar Masilam	10	0	91,22	2,09
31	Bosar Maligas	16	1	285,88	6,52
32	Ujung Padang	19	1	228,49	5,23
Kabupaten Simalungun		386	27	4.372,50	100,00

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Simalungun 2011-2031, Bappeda Kab. Simalungun

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di bagian Timur Pesisir. Secara geografis, Kabupaten Simalungun terletak pada 02°36′05″-03°18′14″ Lintang Utara dan 98°32′03″-99°35′03″ Bujur Timur.

Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 20 – 1.400 m di atas permukaan laut dimana 75 % lahannya berada pada kemiringan 0-15% dan memiliki letak yang cukup strategis serta berada di kawasan Danau Toba. Rata-rata jarak tempuh dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Simalungun menuju ibukota Kabupaten adalah 51,42 km, dimana jarak terjauh adalah Kecamatan Silou Kahean sejauh 127 km dan Kecamatan Ujung Padang sejauh 113 km.

Gambar 1.1.

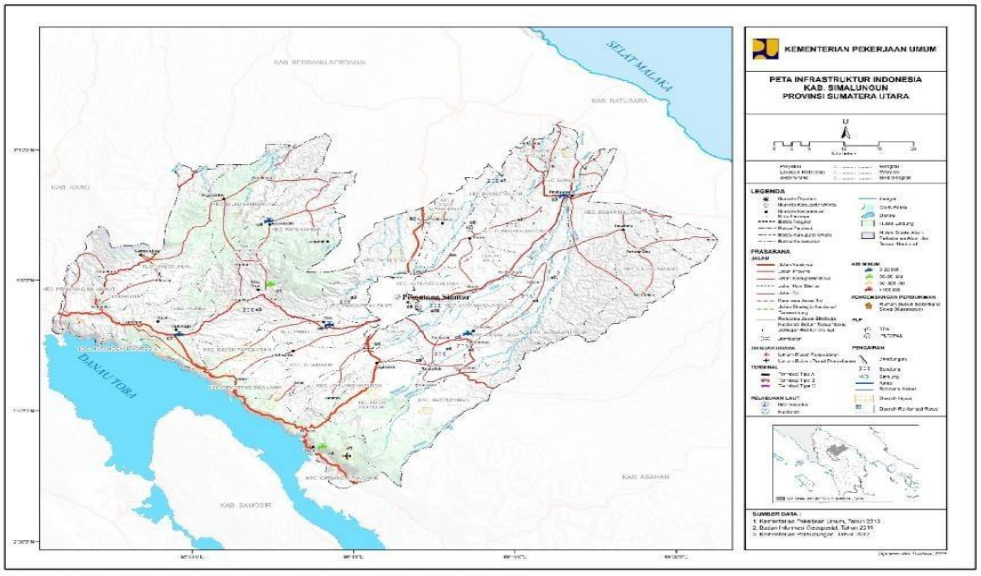

3. Morfologi dan Topografi

Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 20 – 1.400 m di atas permukaan laut (rata-rata 3.369 m) dan dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori wilayah berdasarkan ketinggian, yaitu :

- Daerah dengan ketinggian 20 m- 389 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran rendah yang meliputi Kecamatan Bandar, Pematang Bandar, Ujung Padang, Sinatar,

Huta Bayu Raja, Tanah Jawa, Bosar Maligas, Dolok Batu Nanggar dan Tapian Dolok dengan luas 2.160,83 km atasu 49,26 % dari luas Kabupaten Simalungun.

- Daerah dengan ketinggian 600 m- 920 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran sedang yang meliputi Kecamatan Panei, Jorlang Hataran, Raya Kahean, Sidamanik, Raya, Dolok Panribuan dan Girsang Sipangan Bolon dengan luas 1.276,07 km atau 29,09 % dari luas Kabupaten Simalungun.
- Daerah dengan ketinggian 1.100 m – 1.400 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Dolok Pardamean, Purba, Silimakuta, Silau Kahean dan Dolok Silau dengan luas 939,70 km atau 21, 65 dari luas Kabupaten Simalungun.
- Dengan topografi, cuaca dan curah hujan yang mencukupi menjadikan Kabupaten Simalungun terkenal sebagai daerah penghasil (lumbung) beras dan perkebunan dengan mata pencaharian penduduk yang terutama adalah usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan, baik skala besar maupun perkebunan rakyat. Wilayah Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 0-1.600 meter di atas permukaan laut (dpl). Luas wilayah Kabupaten Simalungun berdasarkan ketinggian dapat dilihat table berikut ini :

Tabel 1.2.
Luas Wilayah Kabupaten Simalungun
Berdasarkan Ketinggian

No	Ketinggian (meter dpl)	Luas (ha)
1.	≤ 100	83.738
2.	101 – 500	161.230
3.	501 – 1000	92.392
4.	1001 – 1500	99.701
5.	≥ 1501	1.599

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Simalungun 2011-2031, Bappeda Kab. Simalungun

Letak Kabupaten Simalungun yang berada di dataran rendah hingga dataran tinggi menyebabkan posisi kemiringan lahan juga berbeda-beda. Penyebaran kemiringan lahan/lereng di wilayah Kabupaten Simalungun terdiri dari : Kemiringan datar (0-2%), landai (2-15 %), bergelombang/berbukit (15-40%) dan curam (> 40%). Luas lahan berdasarkan penyebaran kemiringan lahan/lereng dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1.3.
Luas Wilayah Kabupaten Simalungun Berdasarkan Penyebaran Kemiringan Lahan/Lereng

No	Kemiringan Lahan/Lereng	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Datar (0% - 2%)	236.176	26,80
2.	Landai (2% - 15%)	92.387	36,61
3.	Bergelombang / Berbukit (15% - 40%)	82.252	22,95
4.	Curam (>40 %)	27.845	13,63
	Jumlah	**438.660**	**100,00**

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2019,BPS Kabupaten Simalungun

4. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Simalungun terdiri atas air permukaan yaitu sungai, rawa dan air bawah tanah. Sesuai dengan Peraturan Menteri PU nomor 11.A/PRT/M/2006 tentang Sungai dan Satuan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di wilayah Kabupaten Simalungun berdasarkan lintas wilayahnya termasuk WS Belawan Ular Padang, WS Toba Asahan, WS Wampu Besitang, WS Bah Bolon dengan DAS sebagai berikut : (a) DAS Silou; (b) DAS Wampu; (c) DAS Bedagai; (d) DAS Asahan; (e) DAS Padang; (f) DAS Silou Tua; (g) DAS Ular; (h) DAS Bahapal; dan (i) DAS Bah Bolon.

Wilayah sungai lintas kabupaten, meliputi wilayah Sungai Bah Bolon, Bah Tongguran, Bah Hapal, dan Bah Pamujian serta sungai-sungai kecil/mata air. Di Kabupaten Simalungun juga terdapat banyak air terjun menyebar hampir di seluruh kecamatan dataran tinggi Kabupaten Simalungun.

5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Simalungun sangat bervariasi, yaitu terdiri atas penggunaan untuk permukiman, persawahan, tegalan/kebun campuran, perkebunan besar, perkebunan rakyat, hutan, semak/alang-alang, kolam/tambak, rawa-rawa, dan lain-lain. Secara umum, penggunaan lahan secara keseluruhan didominasi untuk sektor pertanian dan perkebunan. Dapat dilihat pada **Tabel 1.4**, penggunaan lahan terluas di Kabupaten Simalungun terdiri dari lahan sawah seluas 31.021 Ha (7,14%), lahan pertanian bukan sawah (tegal/kebun, ladang, perkebunan, hutan rakyat, padang penggembalaan/rumput, hutan negara, tambak, kolam empang dll) seluas 357.111 Ha (84,54%), lahan bukan pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll) seluas 27.518 Ha (8,3%).

Adanya perkembangan penduduk dan kegiatannya, kemajuan perekonomian masyarakat dan pengaruh kemajuan teknologi dan informasi serta perubahan nasional dan global mendorong terjadinya perubahan pemilihan lokasi pemukiman dan kegiatan, perkembangan kegiatan dan fungsi suatu lokasi dan wilayah yang akhirnya akan merubah pemanfaatan ruang. Perubahan pemanfaatan ruang pemukiman untuk kebutuhan rumah, bangunan perdagangan dan jasa, dan perlengkapan pemukiman lainnya terjadi sejalan dengan penyebaran penduduk dari kondisi yang ada sehingga pemanfaatan ruang permukiman semakin ekspansif dari lokasi yang sudah ada. Desentralisasi keuangan dan pembangunan ke daerah kabupaten dan kota yang diikuti dengan peningkatan fungsi dan kegiatan pemerintah juga pendorong peningkatan perluasan lahan permukiman.

Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti industri, transportasi dan pertambangan cukup cepat dan mengubah pola pemanfaatan ruang yang ada. Kegiatan pemanfaatan ruang tersebut bertambah luas namun bersifat lebih terkonsentrasi

dan tidak tersebar. Perincian penggunaan lahan di Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.

Klasifikasi Lahan Berdasarkan Penggunaannya

No	Penggunaan Lahan	Luas Realisasi Dalam Satu Tahun					Total Luas (3)+(4)+(5)+(6)+(7)
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi*)	Sementar Tidak Diusahakan	
		Tiga Kali	Dua Kali	Satu Kali			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**LAHAN PERTANIAN**						
1.1	**Lahan Sawah**						
	a. Irigasi	-	30.550,5	470,5	-	-	31.021
	b. Tadah hujan	-	-	232	-	-	232
	c. Rawa pasang surut	-	-	-	-	-	
	d. Rawa lebak	-	-	-	-	-	
	Jumlah Lahan 6Sawah	**-**	**30.550,5**	**702,5**	**-**	**-**	**31.253**
1.2	**Lahan Bukan Sawah**						
	a. Tegal/kebun						68.767
	b. Ladang/huma						47.559
	c. Perkebunan						132.059
	d. Hutan rakyat						25.369
	e. Padang penggembalaan/rumput						9.281
	f. Hutan negara						39.745
	g. Sementara tida						25.768
	h. Lainnya (tambak, kolam, empan						21.129
	Total Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah						369.677
2	**LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll)**						36.320
3	**TOTAL = Jumlah Lahan Sawah + Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah + Jumlah Lahan Bukan Perta**						**437.250**
4	**LUAS WILAYA**						437.250

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2019,BPS Kabupaten Simalungun

6. Kawasan Strategis

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan Strategi Nasional dan Kawasan Strategi Provinsi dalam wilayah kabupaten :

1) Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat di wilayah Kabupaten Simalungun meliputi Kawasan Strategis Danau Toba dan sekitarnya untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup.
2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Simalungun meliputi Kawasan Strategis Agropolitan Dataran Tinggi untuk pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Silimakuta, Kawasan Strategis Tebing Tinggi - Siantar untuk pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan Kecamatan Tapian Dolok, dan Kawasan Strategis Simalungun – Batubara - Asahan dan sekitarnya (mencakup di dalamnya KEK Sei Mangke).

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dilakukan melalui perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya serta kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

1.3.2. Demografi

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama kurun waktu empat tahun terakhir yakni terhitung sejak 2017-2020, jumlah penduduk Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan setiap tahun. Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk mengalami laju pertumbuhan rata-rata meningkat 0,53 persen setiap tahunnya.

Tabel 1.5.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2019

No	Uraian/Tahun	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk	854.489	859.228	863.693	867.922
2	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,59	0,55	0,52	0,49

m

Sumber : Simalungun Dalam Angka 2016-2019, diolah

Jumlah penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2019 (BPS Kabupaten Simalungun 2020) berjumlah 867.922 jiwa meningkat sebesar 4.229 jiwa dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 863.693 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,49%.

Ditinjau dari segi sebaran atau distribusi penduduk, jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Bandar dan yang terendah ada di Kecamatan Haranggaol Horison.

Kepadatan penduduk tertinggi sebesar 913 jiwa/km² terdapat di Kecamatan Siantar, disusul Kecamatan Bandar 705 jiwa/km² dan Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi 586 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Dolok Silau sebesar 48 jiwa/km² dan Kecamatan Hatonduhan 64 jiwa/km². Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Simalungun per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2019
Kabupaten Simalungun

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan penduduk (jiwa/km2)
1	Silimakuta	74,16	16.656	225
2	Pematang Silimahuta	79,68	11.016	138
3	Purba	172,71	24.878	144
4	Haranggaol Horison	40,97	5.108	125
5	Dolok Pardamean	67,90	12.994	191
6	Sidamanik	80,88	27.883	345
7	Pematang Sidamanik	137,8	16.784	122
8	Girsang Sipangan Bolon	129,89	15.085	116
9	Tanah Jawa	174,33	48.004	275
10	Hatonduhan	336,26	21.428	64
11	Dolok Panribuan	148,62	18.500	124
12	Jorlang Hataran	93,7	15.784	168
13	Panei	77,96	22.472	288
14	Panombeian Panei	73,74	19.660	267
15	Raya	261,56	26.191	100
16	Dolog Masagal	105,77	9.831	93
17	Dolok Silou	302,66	14.664	48
18	Silou Kahean	228,74	17.749	78
19	Raya Kahean	204,89	17.976	88
20	Tapian Dolok	119,89	42.342	353
21	Dolok Batu Nanggar	106,91	41.116	385
22	Siantar	73,99	67.546	913
23	Gunung Malela	96,74	35.546	367
24	Gunung Maligas	51,39	28.576	556
25	Hutabayu Raja	191,43	30.031	157
26	Jawa Maraja Bah Jambi	38,97	22.825	586
27	Pematang Bandar	88,16	31.778	360
28	Bandar Huluan	107,33	26.725	249
29	Bandar	100,69	71.009	705
30	Bandar Masilam	91,22	25.061	275
31	Bosar Maligas	285,43	41.171	144
32	Ujung Padang	228,49	41.534	182

Sumber : Simalungun Dalam Angka (2019), Data Diolah

1.3.3. Perekonomian

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 38,06 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2019 sebesar 27,35 triliun rupiah. Berdasarkan Data perkembangan PDRB tahun 2016-2019 menunjukkan pertumbuhan positip, seperti terdapat pada table berikut :

Tabel 1.7
Perkembangan PDRB Kabupaten Simalungun
ADH Berlaku dan ADH Konstan 2016-2019

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
(1)	(2)	(3)
2016	30.122.877,5	23.508.970,0
2017	32.832,126,2	24.715.672,1
2018*	35.444,572,5	25.996.206,6
2019**	38.057.431,8	27.348.699,5

Sumber: BPS Kabupaten .Simalungun, 2020.

Jika dibandingkan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, maka PDRB Kabupaten Simalungun menduduki peringkat keempat tertinggi setelah Medan, Deli Serdang dan Langkat. Peranan PDRB terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 4,75%.Tabel 1.8:

Tabel 1.8
10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota dengan Kontributor Terbesar PDRB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	ADH Berlaku	ADH Konstan	Peranan terhadap PDRB
(1)	(2)	(3)	
Medan	241.482,35	156.780,58	30,12
Deli Serdang	109.334,14	71.878,69	13,64
Langkat	42.515,18	29.597,77	5,30
Simalungun	38.057,43	27.348,70	4,75
Asahan	37.440,41	26.245,24	4,67

Batubara	34.047,85	23.998,59	4,25
Labuhan Batu	33.610,43	23.232,71	4,19
Serdang Bedagai	27.959,44	19.393,39	3,49
Labuhan Batu Selatan	27.132,30	18.750,16	3,38
Labuhan Batu Utara	24.378,34	17.259,19	3,04
Provinsi Sumatera Utara	801.733,34	539.526,6	

Sumber: BPS Kabupaten .Simalungun, 2020.

2. Struktur Perekonomian

Struktur lapangan usaha sebagian bergeser dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya.Hal tersebut terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Simalungun. Sumbangan terbesar tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kemudian Industri Pengolahan serta konstruksi. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing dibawah 5 (lima) persen, seperti terdapat pada tabel berikut :

Tabel 1.9
Peranan PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016-2019 (Persen) Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	50,89	49,49	48,69	48,67
B	Pertambangan dan Penggalian	0,24	0,24	0,24	0,23
C	Industri Pengolahan	11,96	12,37	12,40	12,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas,	0,06	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	9,85	10,24	10,55	10,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	15,31	15,94	16,42	16,79
H	Transportasi dan Pergudangan	1,70	1,68	1,68	1,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,95	0,94	0,93
J	Informasi dan Komunikasi	0,56	0,57	0,55	0,54

K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,18	1,15	1,12	1,11
L	Real Estate	0,92	0,92	0,91	0,94
M,N	Jasa Perusahaan	0,09	0.09	0,09	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,66	4,66	4,67	4,62
P	Jasa Pendidikan	1,05	1,05	1,06	1,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	0,38	0,39	0,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,11	0,11	0,12	0,12
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten .Simalungun, 2020.

Konstribusi lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas serta lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang terhadap PDRB merupakan konstribusi terkecil, masing-masing sebesar 0,07 persen dan 0,09 persen.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Simalungun pada tahun 2019 mengalami akselerasi dibandingkan tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan PDRB Simalungun tahun 2019 mencapai 5,20 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 5,18 persen. Demikian juga pada tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi juga mengalami percepatan.

Semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positip. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu masing-masing sebesar 6,31 persen dan 6,18 persen, disusul oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan sebesar 5,87 persen, dan lapangan usaha Real Estate sebesar 6,81 persen. Sedangkan 3 (tiga) lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 1,83 persen, Industri Pengolahan sebesar 2,80 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,39 persen. Peranan PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha seperti terdapt pada table berikut :

Tabel 1.10
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016-2019 (Persen)

NO	LAPANGAN USAHA	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,87	4,48	5,10	6,18
B	Pertambangan dan Penggalian	3,13	8,23	4,02	3,83
C	Industri Pengolahan	4,70	4,44	3,71	2,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas,	4,16	5,40	3,23	4,74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,78	5,54	4,51	4,11
F	Konstruksi	8,91	7,20	6,62	4,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	6,75	7,36	5,52	4,02
H	Transportasi dan Pergudangan	7,28	8,02	6,58	6,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,88	5,24	5,16	5,68
J	Informasi dan Komunikasi	5,56	5,85	3,29	1,83
`	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,98	1,47	2,33	3,39
L	Real Estate	5,99	5,56	5,76	5,81
M,N	Jasa Perusahaan	4,13	6,12	5,28	4,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,15	2,66	6,07	4,13
P	Jasa Pendidikan	3,98	7,38	6,02	5,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,25	7,27	6,20	5,08
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,78	6,48	6,29	5,42
PDRB	**PDRB**	**5,24**	**5,40**	**5,13**	**5,20**

Sumber: BPS Kabupaten .Simalungun

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun mengalami perubahan yang sama dengan Provinsi Sumatera Utara yaitu mengalami akselerasi dari tahun 2016 ke tahun 2017, namun pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang melambat meskipun untuk tahun selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami akselerasi. Sepanjang tahun 2016 sampai 2017, pertumbuhan ekonomi Simalungun selalu berada di atas pertumbuhan Sumatera

Utara. Namun pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Simalungun berada di bawah pertumbuhan Sumatera Utara.

4. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 1.11
PDRB Per Kapita Simalungun Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2016-2019 (Ribu Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku		ADH Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	35.252,50	10,30	27.512,31	4,77
2017	38.211,19	8,39	28.764,98	4,55
2018*	41.038,39	7,40	30.0098,90	4,64
2019**	43.848,91	6,85	31.510,55	4,69

Sumber: BPS Kabupaten .Simalungun, 2020.

PDRB Per Kapita Kabupaten Simalungun atas dasar harga berlaku pada tahhun 2016 sebesar 35,25 juta rupiah meningkat menjadi 43,84 juta rupiah pada tahun 2019. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2016-2019 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2019, PDRB per kapita Simalungun atas dasar harga kostan mencapai 31,51 juta rupiah. Berdasarkan atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan PDRB per Kapita sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berfluktuasi. Tahun 2016 PDRB per Kapita Simalungun tumbuh sebesar 4,77 persen sedangkan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 4,69 persen.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Simalungun selama kurun waktu 2016-2019 terus mengalami peningkatan. Capaian IPM Kabupaten Simalungun pada tahun 2016 adalah sebesar 71,48 dan secara perlahan meningkat menjadi 71,83 di tahun 2017, kemudian menjadi 72,49 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 73,14. Dengan nilai IPM sebesar 73,14 maka Kabupaten Simalungun berada pada posisi status pembangunan manusia kategori "**Tinggi**". Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan relatif berhasil namun harus lebih ditingkatkan pada tahun mendatang guna meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, yang diukur dari indicator kesejahteraan rakyat yang meliputi (i) indikator kesehatan, (ii) indikator pendidikan, serta (iii) daya beli masyarakat yang meningkat. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Simalungun berada pada peringkat ke-11 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara setelah Kota Medan, Pematangsiantar, Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Toba Samosir, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Karo, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Pada tahun 2019, Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 71,07 yang berarti di Kabupaten Simalungun rata-rata bayi yang lahir tahun 2019 dapat bertahan hidup hingga usia 71,07 tahun. Rata-rata lama sekolah mencapai 9,36 tahun atau setara dengan mencapai SMP kelas II dan III. Sementara harapan lama sekolah mencapai 12,76 yang berarti anak berusia 7 tahun Simalungun yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 12,76 tahun atau mencapai SMA kelas III atau Diploma I.

Tabel 1.12
Perkembangan Indikator Pembentuk IPM
Tahun 2016-2019 Kabupaten Simalungun

Komponen IPM	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,43	70,53	70,75	71,07
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,70	12,71	12,75	12,76
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,86	8,95	9,18	9,36
Pengeluaran Per kapita/Daya Beli (Rp.000,) (Rp/Orang/Tahun)	10.785	11.055	11.031	11.619

Sumber: BPS Simalungun, 2020.

6. Kemiskinan

Berdasarkan hasil Susenas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simalungun beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin di Kabupaten Simalungun sebesar 10,81 % menurun menjadi 10,65 % pada tahun 2017. Pada tahun 2018 menurun kembali menjadi 9,31 % dan pada tahun 2019 menjadi 8,81 %.

Tabel 1.13
Persentase Penduduk Miskin 2016-2019
Kabupaten Simalungun

Tahun	Persentase
2016	10,81
2017	10,65
2018	9,31
2019	8,81

Sumber: BPS Simalungun, 2020.

7. Ketenagakerjaan.

Jumlah Angkatan Kerja Simalungun pada Agustus 2019 sebanyak 436.057 orang, berkurang 7.421 orang dibanding Agustus 2018. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2019 sebanyak 416.910 orang, sedangkan yang menganggur 19.147

orang. Disbanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja berkurang 3.932 orang, sedangkan pengangguran berkurang 3.489 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Kabupaten Simalungun pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada Agustus 2017, TPT Kabupaten Simalungun sebesar 5,62%, menurun menjadi 5,1% ditahun 2018 dan menurun kembali menjadi 4,39 % di tahun 2019.

8. Pemerintahan

Jumlah ASN Kabupaten Simalungun tahun 2019 sebanyak 10.180 orang yang terdiri dari 3.155 orang laki-laki dan 7.025 orang perempuan. Kelembagaan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun terdiri dari Sekretariat Daerah 3 Asisten dan 12 Bagian, 1 Sekretariat DPRD, Dinas 22 OPD, Badan 7 OPD, Inspektorat 1 OPD, Satuan Polisi Pamong Praja 1 OPD dan 3 Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan untuk kecamatan terdiri dari 32 Kecamatan, 386 Nagori (desa) dan 27 Kelurahan. Rincian Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat Daerah :
   a. Asisten terdiri dari :
      1) Asisten Administrasi dan Kesra.
      2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
      3) Asisten Administrasi dan Umum.
   b. Staf Ahli terdiri dari :
      1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
      2) Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
      3) Staf Ahli Bidang Administrasi dan Umum.
   c. Kepala Bagian terdiri dari :
      1) Bagian Tata Pemerintahan
      2) .Bagian Kerjasama

3) Bagian Kesejahteraan Rakyat
4) Bagian Hukum
5) Bagian Pembangunan
6) Bagian Perekonomian
7) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
8) Bagian Sumber Daya Alam
9) Bagian Organisasi
10) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
11) Bagian Perencanaan dan Keuangan
12) Bagian Umum.

B. Sekretariat DPRD.

C. Dinas/Badan/Inspektorat/Satuan Polisi Pamong Praja:
1) Inspektorat
2) Dinas Pendidikan
3) Dinas Kesehatan dan 3 RSUD yaitu :
   a. Rumah Sakit Umum Daerah Parapat
   b. Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan
   c. Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim
4) Dinas Pekerjaan Umum
5) Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air
6) Dinas Sosial
7) Satuan Polisi Pamong Praja
8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9) Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan
10) Dinas Lingkungan Hidup
11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori
13) Dinas Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana
14) Dinas Perhubungan

15) Dinas Komunikasi dan Informatika
16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17) Dinas Tenaga Kerja
18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20) Dinas Pemuda dan Olah Raga
21) Dinas Pertanian
22) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
24) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26) Badan Pendapatan Daerah
27) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
28) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30) Administrator KEK Sei Mangke

1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issue)* yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai :

a. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, yaitu :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunini;
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Pembangunan Tahun 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi dan misi sebagai acuan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan sampai 5 (lima) tahun terakhir ini dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah yang dimiliki. Visi Pembangunan Kabupaten yang ditetapkan Simalungun tahun 2016-2021 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Simalungun yang Mandiri, Tentram dan Berseri (MANTAP)"

Adapun makna dari visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. **MANDIRI**
   Mandiri secara perekonomian berbasiskan pada kemampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan untuk tercapainya tingkat kesehatan yang tinggi dan kebutuhan untuk membiayai pendidikannya serta didukung dengan peningkatan fasilitas-fasilitas umum dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung akses perekonomian masyarakat.
2. **TENTERAM**
   Tercapainya keseimbangan dan keharmonisan di tengah masyarakat dan tercapainya pemahaman masyarakat akan hak dan kewajibannya serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan Kabupaten Simalungun sengan membangun sinergi antara masyarakat dan pembangunan.
3. **BERSERI**
   Tercapainya masyarakat yang unggul dengan nuansa yang berbeda dan unggul secara kualitas dengan menggunakan budaya menjadi pedoman dalam perilaku dan tindakan keseharian untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Simalungun dalam menghadapi persainagan bebas.

B. Misi Pembangunan Tahun 2016-2021

Misi Kabupaten Simalungun dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Simalungun 2016-2021 ditetapkan dalam 5 (lima) Misi, yaitu:

1. Peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur
   - Kabupaten Simalungun merupakan daerah sentra pertanian sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk-produk pertanian masyarakat.
   - Peran serta pemerintah diwujudkan dalam bentuk pembukaan akses jalan usaha tani serta jalan antar desa ke ibukota kecamatan serta jalan antara Kecamatan menuju Ibukota Kabupaten
   - Peran serta pemerintah juga diwujudkan dalam pembangunan fasilitas-fasilitas pertanian yang berbasis industri rumah tangga dan pembangunan sarana pertanian lain seperti irigasi dan lain-lain.
2. Peningkatan Tingkat Kesehatan Masyarakat.
   - Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
   - Peningkatan pelayanan di setiap puskesmas yang didukung dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas penunjang kesehatan serta peningkatan kemampuan pelayanan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun.
3. Pengembangan dan Pemerataan Akses Pembangunan Sumber Daya Manusia
   - Pengembangan dan Pemerataan Akses Sumber Daya Manusia ini diwujudkan dengan tersedianya fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas serta dapat menikmati oleh semua masyarakat Kabupaten Simalungun

- Pemerataan Akses Pendidikan menjadi sangat penting dimana lembaga pendidikan yang berkualitas harus dapat diakses oleh semua masyarakat tanpa membeda-bedakan taraf perekonomiannya. Pemerataan akses ini dapat diwujudkan dengan membangun sistem pendidikan dan pembiayaan pendidikan yang berpihak kepada si miskin dengan menyediakan beasiswa.

4. Menjamin Ketentraman Masyarakat
   - Ketentraman hubungan masyarakat Kabupaten Simalungun dengan berbagai latar belakang yang beraneka ragam, mulai dari etnis dan agama yang berbeda-beda.
   - Menempatkan Simalungun menjadi miniatur Indonesia di Sumatera Utara.
   - Semua masyarakat dengan segala kebhinnekaan ini harus dijamin untuk mendapatkan kenyamanan dan kesempatan yang sama untuk menjalankan ajarannya dan budayanya di Kabupaten Simalungun.
5. Meningkatkan Daya Saing.
   - Pembukaan akses terhadap fasilitas-fasilitas pasar sehingga semua produk masyarakat berdaya saing sehingga diterima di pasar dan bernilai jual di pasar.
   - Daya saing juga berkaitan dengan usaha membangun image Kabupaten Simalungun yang lebih baik di kancah nasional dengan menunjukkan pembangunan, wisata dan produk-produk Kabupaten Simalungun yang mampu berbicara di level nasional.

C. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021 terhadap masing-masing misi Bupati Simalungun Tahun 2016-2021 dalam bentuk matriks seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.

Hubungan Hierarki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	
Percepatan Pembangunan Infrastruktur					
1	Pembangunandan rehabilitasi sarana prasarana jalan, irigasi, dan sarana permukiman	1	Meningkatnya kualitas prasarana jalan, irigasi dan Pertanian	1	Panjang jalan kondisi baik
				2	Kondisi irigasi dalam keadaan baik dan sedang
		2	Meningkatkan kualitas air bersih	1	Persentase cakupan pelayanan air minum
Peningkatan Kesehatan Masyarakat					
2	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat	3	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dasar	1	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi (32 Puskesmas)
		4	Terwujudnya pelayanan kesehatan penduduk miskin	1	Persentase peserta BPJS kesehatan non PBI dan mandiri
		5	Meningkatnya upaya pelayanan Kesehatan	1	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan
		6	Terlaksananya pelayanan imunisasi bagi anak usia 0-11 Bulan	1	Meningkatnya persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar Lengkap
		7	Meningkatnya kinerja pelayanan KB	1	Persentase Pasangan Usia Sumbur yang menjadi Akseptor KB
				2	Sarana Penyuluh KB yang tersedia di kecamatan
Pengembangan dan Pemerataan Akses Pembangunan SDM					
3	Meningkatkan kualitas pendidikan dan akses masyarakat Untuk memperoleh pendidikan.	8	Meningkatnya kualitas sarana pendidikan	1	Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik dan sedang (SD, SMP)
		9	Meningkatnya Kualifikasi pendidikan guru	1	Tingkat Kualifikasi pendidikan guru (SD dan SMP)
		10	Meningkatnya mutu Pendidikan	1	Nilai Rata-rata Ujian Nasional (SD/SMP)
				2	Meningkatnya melek aksara
		11	Meningkatnya angka partisipasi Sekolah	1	Persentase Angka Partisipasi Sekolah TK/PAUD
				2	Persentase Angka Partisipasi Sekolah SD/MI
				3	Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMP
		12	Meningkatnya minat baca masyarakat	1	Jumlah pengunjung perpustakaan(Tahun)

Menjamin Ketentraman Masyarakat					
4	Meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif.	13	Meningkatnya keamanan/ Ketertiban masyarakat serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1	Pelaksanaan patroli Satpol PP (Kali/Minggu) di wilayah Kecamatan
				2	Kejadian /insiden disebabkan oleh SARA
				3	Terbinanya Ormas dan LSM
Meningkatkan Daya Saing					
5	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	14	Meningkatnya kinerja Pelayanan Publik	1	Peringkat LPPD
				2	Nilai evaluasi AKIP
				3	Opini BPK terhadap laporan keuangan
				4	Persentase OPD dalam kegiatan pengawasan internal secara berkala
				5	Ketepatan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah
				6	Persentase dokumen pelayanan perizinan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan
				7	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil Akte Kelahiran (0-18 Tahun)
				8	Meningkatnya tertib administrasi dokumen kependudukan (e –KTP)
				9	Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi
		15	Meningkatnya pendapatan asli daerah	1	Persentase kenaikan penerimaan PAD
		16	Meningkatnya kesempatan kerja dan berkembangnya usaha koperasi/ Industri Kecil Menengah	1	Persentase koperasi yang aktif
				2	Persentase pelaku IKM yang mendapatkan pelatihan dan bantuan peralatan
		17	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup
				2	Persentase penanganan kasus-kasus lingkungan hidup
		18	Meningkatnya pemberdaayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Persentase penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilayani
		19	Meningkatnya kinerja pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagori/desa.	1	Jumlah pembinaan ke nagori dalam pengelolaan ADD dan DD
				2	Jumlah PKK yang aktif di nagori untuk memberdayakan 10 Program Pokok PKK

		20	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1	Skore Pola Pangan Harapat (PPH)
6	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	21	Meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah bidang pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan unggulan:	
				A	Padi
				B	Jagung
				C	Ubi Kayu
				Jumlah produksi hortikultura unggulan	
				A	Cabe
				Jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	
				A	Sawit
				B	Karet
				C	Kopi
		22	Meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah bidang pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	
				A	Jumlah kunjungan wisata mancanegara
				B	Jumlah kunjungan wisata lokal

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja merupakan Rencana Kerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun yang merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja oleh seluruh OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun selama Tahun Anggaran 2020.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 sepertin terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitasprasarana jalan, irigasi dan pertanian	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	42 Km	Dinas Pekerjaan Umum
		Kondisi irigasi dalam keadaan baik dan Sedang	3145 M	Dinas PR & PSDA
2	Meningkatkan kualitas akses pelayanan air bersih	Persentase cakupan pelayanan air minum	36 Unit	Dinas Pekerjaan Umum
3	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dasar	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi (32 Kecamatan)	46 Unit	Dinas Kesehatan

4	Terwujudnya pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase peserta BPJS kesehatan non PBI dan mandiri	100 %	
5	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	100 %	
6	Terlaksananya pelayanan imunisasi bagi anak usia 0-11 bulan	Meningkatnya persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100 %	
7	Meningkatnya kinerja pelayanan KB	Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi Akseptor KB	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Sarana Penyuluh KB yang tersedia di Kecamatan	10 Unit	
8	Meningkatnya kualitas sarana pendidikan	Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik dan sedang (SD, SMP)	89 %	Dinas Pendidikan
9	Meningkatnya kualifikasi pendidikan guru	Tingkat Kualifikasi pendidikan guru (SD dan SMP)	90 %	
10	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai Rata-rata Ujian Nasional (SD/SMP)	7,5	Dinas Pendidikan
11	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Persentase APK ekolah TK/PAUD	70%	
		Persentase APM SD/MI	95 %	
		Persentase APM SMP	95 %	
12	Meningkatnya minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan (1 Tahun)	15.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
13	Meningkatnya keamanan /ketertiban masyarakat serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelaksanaan patroli penegakan Perda di wilayah kecamatan	100 %	Satpol PP
		Kejadian /insiden disebabkan oleh SARA	0	Badan Kesbangpol
		Terbinanya Ormas dan LSM	90 %	
14	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Evaluasi LPPD	3,0	Sekretariat Daerah
		Nilai evaluasi AKIP	AA	Bappeda
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	BPKAD
		Persentase OPD dalam kegiatan pengawasan internal secara berkala	100 %	Inspektorat
		Ketepatan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah	100 %	Bappeda
		Persentase dokumen pelayanan perizinan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %	DPM dan PIT
		Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil Akte Kelahiran (0-18 Tahun)	25.000 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Capil
		Meningkatnya tertib administras dokumen kependudukan (e –KTP)	55.000 Dokumen	
		Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	90 %	DPBD

15	Meningkatnya pendapatatan asli daerah	Persentase kenaikan penerimaan PAD	100%	Badan Pendapatan Daerah
16	Meningkatnya kesempatan kerja dan berkembangnya usaha koperasi/ Industri Kecil Menengah	Persentase koperasi yang aktif	100%	Dinas Koperasi
		Persentase pelaku IKM yang mendapatkan pelatihan dan bantuan peralatan	100%	Disperindag
17	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase penanganan kasus-kasus lingkungan hidup	100 %	
18	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	100 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlndungan Anak
19	Meningkatnya kinerja pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagori/desa.	Jumlah pembinaan ke nagori dalam pengelolaan ADD dan DD	386 Nagori	DPMPN
		Jumlah PKK yang aktif di nagori untuk memberdayakan 10 Program Pokok PKK	386 Nagori	
20	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	94,70	Dinas Hanpang
21	Meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah Bidang pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan unggulan:		Dinas Pertanian
		a. Padi	366.887 Ton	
		b. Jagung	234.977 Ton	
		c. Ubi Kayu	213.319 Ton	
		Jumlah produksi hortikultura unggulan		
		a. Cabe	35.232 Ton	
		Jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat		
		a. Sawit	548.400 Ton	
		b.Karet	2.500 Ton	
		c. Kopi	4.400 Ton	
22	Meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah bidang pariwisata	Jumlah kunjungan wisata mancanegara	20.000 Org	Dinas Pariwisata
		Jumlah kunjungan wisata Nusantara	500.000 Org	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu media untuk mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi. Sebagai salah satu bentuk transparansi, pengukuran kinerja dilakukan dengan realisasi masing-masing kinerja unit organisasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja Instansi Pemerintah, hal itu sejalan dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian kinerja utama Instansi Pemerintah yang titik beratnya pada Penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Untuk pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan skala ordinal dengan 5 (lima kategori) yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang dan Sangat Kurang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1:
Skala Pengukuran Capaian Kinerja

No	Skala Pengukuran Capaian Kinerja	Kategori
1	>90	Sangat Baik
2	75 s/d 89,99	Baik
3	65 s/d 74,99	Cukup
4	50 s/d 64,99	Kurang
5	0 s/d 49,99	Sangat kurang

A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020.

Pengukuran capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang merupakan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai gambaran pencapaian target kinerja sasaran strategis.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian srategis. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program / kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu:

Tabel 3.2
Interprestasi atas Pencapaian Sasaran

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang
5	0	Data tidak ada/ Tidak Lengkap

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Perhitungan persentase pencapaian target kinerja perlu memperhatikan karakteristik

komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun tahun 2020 telah menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.2:
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Simalungun Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Satuan	Realisasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Misi Pertama: Percepatan Pembangunan Infrastruktur.							
1	Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan irigasi	Panjang jalan dalam kondisi baik	42	Km	9,5	22,61	KURANG
		Kondisi irigasi dalam keadaan baik dan sedang	314,5	Meter	314,5	100	BAIK
2	Meningkatnya akses pelayanan air bersih	Persentase cakupan pelayanan air minum	36	Unit	28	77,7	BAIK
Misi Kedua : Peningkatan Kesehatan Masyarakat							
3	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dasar	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi (32 Kecamatan)	46	Unit	41	89	BAIK
4	Terwujudnya pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase peserta BPJS kesehatan non PBI dan Mandiri	100	%	67,98	67,98	CUKUP
5	Meningkatnya upaya pelayanan	Persentase persalinan di	100	%	100	100	BAIK

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Satuan	Realisasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	kesehatan	fasilitas kesehatan					
6	Terlaksananya pelayanan imunisasi bagi anak usia 0-11 bulan	Meningkatnya persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100	%	88,33	88,33	BAIK
7	Meningkatnya kinerja pelayanan KB	Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi Akseptor KB	100	%	79,42	79,42	BAIK
		Sarana Penyuluh KB yang tersedia di Kecamatan	0	Unit	0	0	TIDAK TEREALISASI
Misi Ketiga : Pengembangan dan Pemerataan Akses Pembangunan SDM							
8	Meningkatnya kualitas sarana pendidikan	Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik dan sedang (SD,SMP)	89	%	95	107	SANGAT BAIK
9	Meningkatnya kualifikasi pendidikan guru	Tingkat kualifikasi pendidikan guru PAUD, SD dan SMP	90	%	83,65	92,99	BAIK
10	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai rata-rata ujian Nasional (SD/SMP)	7,50	Nilai	6,74	89,93	BAIK
11	Meningkatnya angka parsipasi sekolah	Persentase APK sekolah TK/PAUD	70	%	56,58	80,82	BAIK
		Persentase APM SD/ MI	95	%	98,64	103	SANGAT BAIK
		Persentase APM SMP	95	%	77,48	81,55	BAIK
12	Meningkatnya minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan (1 Tahun)	15.000	Orang	2.896	19,30	KURANG
Misi Keempat : Menjamin Ketentraman Masyarakat							
13	Meningkatnya keamanan/ketertiban masyarakat	Pelaksanaan patroli penegakan Perda di wilayah kecamatan	100	%	100	100	BAIK

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Satuan	Realisasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kejadian/insiden disebabkan oleh SARA	0	Kejadian	0	100	BAIK
		Terbinanya Ormas dan LSM	90	%	0	0	TIDAK TEREALISASI
Misi Kelima : Meningkatkan Daya Saing							
14	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Evaluasi LPPD	3,0	Nilai	On Process	On Process	On Process
		Nilai Evaluasi LAKIP	AA	Nilai	On Process	On Process	On Process
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	On Process	On Process	On Process
		Persentase OPD dalam kegiatan pengawasan internal secara berkala	100	%	77	77	BAIK
		Ketepatan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah	100	%	100	100	BAIK
		Persentase dokumen pelayanan perizinan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	100	100	BAIK
		Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil Akte Kelahiran (0-18) Tahun	25.000	Dokumen	21.569	86,20	BAIK

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Satuan	Realisasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Meningkatnya tertib administrasi dokumen kependudukan (e-KTP)	55.000	Dokumen	52.423	95,31	BAIK
		Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	90	%	42	46,67	KURANG
15	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase kenaikan penerimaan PAD	100	%	87,22	87,22	BAIK
16	Meningkatnya kesempatan kerja dan berkembangnya usaha koperasi/Industri Kecil Menengah	Persentase koperasi yang aktif	100	%	65,95	65,95	CUKUP
		Persentase pelaku IKM yang mendapatkan pelatihan dan bantuan peralatan	100	%	27,27	27,27	KURANG
17	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	100	%	95	95	BAIK
		Persentase penanganan kasus-kasus lingkungan hidup	100	%	63	63	CUKUP
18	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase penanganan kekerasan anak dan perempuan yang dilayani	100	%	95	95	BAIK
19	Meningkatnya kinerja pemberdayaan masyarakat dan	Jumlah pembinaan ke nagori dalam pengelolaan ADD dan DD	386	Nagori	386	100	BAIK

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Satuan	Realisasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	pemerintahan nagori/desa	Jumlah PKK yang aktif di nagori untuk untuk memberdayakan 10 Program Pokok PKK	386	Nagori	386	100	BAIK
20	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	94,70	Nilai	83,77	88,4	BAIK
21	Meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah bidang pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan unggulan					
		a. Padi	366.887	Ton	377.526	102.89	CUKUP
		b. Jagung	234.977	Ton	257.770	109,70	SANGAT BAIK
		c. Ubi Kayu	213.319	Ton	155.047	72,68	CUKUP
		Jumlah produksi hortikultura unggulan					
		a. Cabe	35.232	Ton	49.356	140,08	SANGAT BAIK
		Jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat					
		a. Sawit	548.400	Ton	559.909,88	102,09	SANGAT BAIK
		b. Karet	2500	Ton	2.288,02	91,52	BAIK
		c. Kopi	4.400	Ton	3.463,46	78,71	BAIK
22	Meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah bidang pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	500.000	Orang	119	0,005	KURANG
		Jumlah kunjungan wisatawan lokal	20.000	Orang	371.159	74	CUKUP
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA IKU						**70,94**	**CUKUP**

Hasil analisis pencapaian indikator kinerja terhadap 22 (dua puluh dua) sasaran yang mencakup 42 (empat puluh dua) indikator kinerja utama, diketahui bahwa :

- 3 indikator kinerja utama atau 7,14 % Pencapaian Kinerjanya Sangat Baik.
- 25 indikator kinerja utama atau 59,52 % Pencapaian Kinerjanya Baik.
- 4 indikator kinerja utama atau 9,52 % Pencapaian Kinerjanya Cukup.
- 5 indikator kinerja utama atau 11,90 % Pencapaian Kinerjanya Kurang.
- 2 indikator kinerja utama atau 4,76 % Pencapaian Kinerjanya Tidak Terealisasi.
- 3 indikator kinerja utama atau 7,31 % Pencapaian Kinerjanya masih *on process*.

B. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisa Sasaran Strategis.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 menggambarkan capaian kinerja dari masing-masing indikator. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagaimana ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) terdiri dari 23 (dua puluh tiga) sasaran dengan 42 (empat puluh dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas prasarana jalan, irigasi, dan pertanian terdiri dari 2 (dua) indikator
- Sasaran 2 : Meningkatnya akses pelayanan air bersih 1 (satu) indikator
- Sasaran 3 : Terciptanya transportasi yang lancar dan aman terdiri dari 1 (satu) indikator.
- Sasaran 4 : Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dasar terdiri dari 1 (satu) indikator
- Sasaran 5 : Terwujudnya pelayanan kesehatan penduduk miskin terdiri dari 1 (satu) indikator
- Sasaran 6 : Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan terdiri dari 1 (satu) indikator

- Sasaran 7 : Terlaksananya pelayanan imunisasi bagi anak usia 0-11 bulan terdiri dari 1 (satu) indikator
- Sasaran 8 : Meningkatnya kinerja pelayanan KB terdiri dari 2 (dua) indikator
- Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas sarana pendidikan terdiri dari 1 (satu) indikator
- Sasaran 10 : Meningkatnya kualifikasi pendidikan guru terdiri dari 1 (satu) indikator
- Sasaran 11 : Meningkatnya mutu pendidikan terdiri dari 1 (satu) indikator
- Sasaran 12 : Meningkatnya angka partisispasi sekolah terdiri dari 3 (tiga) indikator
- Sasaran13 : Meningkatnya minat baca masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator
- Sasaran 14 : Meningkatnya keamanan/ketertiban masyarakat serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan terdiri dari 3 (tiga) indikator
- Sasaran 15 : Meningkatnya kinerja pelayanan publik terdiri dari 9 (sembilan) indikator
- Sasaran 16 : Meningkatnya pendapatan asli daerah terdiri dari 1 (satu) indikator
- Sasaran 17 : Meningkatnya kesempatan kerja serta berkembangnya usaha koperasi dan Industri Kecil Menengah terdiri dari 2 (dua) indikator
- Sasaran 18 : Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari 2 (dua) indikator
- Sasaran 19 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari 1 (satu) indikator
- Sasaran 20 : Meningkatnya kinerja pemberdayaan masyarakat dan nagori/desa terdiri dari 1 (satu) indikator
- Sasaran 21 : Meningkatnya ketahanan pangan daerah terdiri dari 1 (satu) indikator
- Sasaran 22 : Meningkatnya kinerja sektor unggulan daerah bidang pertanian terdiri dari 7 (tujuh) indikator
- Sasaran 23 : Meningkatnya kunjungan wisata terdiri dari 2 (dua) indikator.

Dari hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2020, secara umum dapat tercapai sesuai dengan

tujuan dan sasaran yang telah diteteapkan, namun masih banyak target yang harus dioptimalkan untuk tahun berikutnya , yaitu :

Tabel. 3.3:
Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Simalungun Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Jlh Indikator	Rata-rata Capaian Indikator	0-49,99	50 - 64,99	65 - 74,99	75 - 89,99	>90
1.	Meningkatnya kualitas prasarana jalan, irigasi dan Pertanian	2	72,61					
2	Meningkatkan kualitas infrstruktur permukiman dan akses pelayanan air Bersih	1	77,7					
3	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dasar	1	89					
4	Terwujudnya pelayanan kesehaan penduduk miskin	1	67,98					
5	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan	1	100					
6	Terlaksananya pelayanan imunisasi bagi anak usia 0-11 bulan	1	83,33					
7	Meningkatnya kinerja pelayanan KB	2	39,71					
8	Meningkatnya kualitas sarana pendidikan	1	107					
9	Meningkatnya kualifikasi pendidikan guru	1	92,99					
10	Meningkatnya mutu pendidikan	1	89,93					
11	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	3	88,45					
12	Meningkatnya minat baca masyarakat	1	19,30					
13	Meningkatnya keamanan/ketertiban masyarakat serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalammenjaga keamanan dan kenyamananlingkungan	3	66,66					
14	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	9	56,13					
15	Meningkatnya pendapatatan asli daerah	1	87,22					
16	Meningkatnya kesempatan kerja dan berkembangnya usaha koperasi/Industrri Kecil Menengah	2	46,61					
17	Menurunya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2	79					

18	Meningkatnya Persentase penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilayani	1	95					
19	Meningkatnya kinerja pemberdayaan masyarakat dan nagori/desa.	2	100					
20	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1	88,4					
21	Meningkatnya sektor unggulan bidang pertanian	7	105,37					
22	Meningkatnya sektor unggulan bidang pariwisata	2	37,0025					

Analisa dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

MISI-1 : PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.
SASARAN-1 : Meningkatnya Kualitas Prasarana Jalan, Irigasi, dan Pertanian.

Sasaran ini merupakan Misi 1 Pemerintah Kabupaten Simalungun yaitu Peningkatkan dan Percepatan Infrastruktur yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu : (1) Panjang Jalan dalam Kondisi sedang dan baik, dan (2) Kondisi irigasi dalam keadaan baik dan sedang dengan rata-rata capaian 72,61 % dengan capaian kinerja Cukup.

Tabel 3.4:
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Prasarana Jalan dan Irigasi

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020		
		Target	Realisasi	%
1	Panjang Jalan dalam Kondisi Sedang dan Baik	42 Km	9,5 Km	22,61
2.	Kondisi Irigasi dalam keadaan baik dan sedang	314,5 m	314,5 m	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2021.

1. Panjang Jalan dalam Kondisi Sedang dan Baik.

Capaian indikator panjang jalan dalam kondisi sedang dan baik merupakan sasaran 1 dari misi peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur, dimana capaian kinerjanya merupakan akumulasi dari penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang jalan yang terealisasi sampai tahun 2020. Realisasi pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2020 yaitu pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 9,5 Km, pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong sepanjang 983 m, pemeliharaan/rehabilitas jalan sepanjang 11,77 Km.

Data kondisi jalan Kabupaten Simalungun sampai dengan tahun 2020 menyajikan total panjang Jalan Kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan pembagi yaitu persentase kondisi jalan antara lain kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Berdasarkan data kondisi jalan tersebut dapat dihitung persentase panjang jalan dalam kondisi sedang dan baik. Hasil penghitungan kondisi jalan Kabupaten Simalungun sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5:
Kondisi Jalan Kabupaten Simalungun Sampai Tahun 2020

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan pada akhir Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Km'	%	Km'	%	Km'	%	Km'	%	Km'	%
1	Baik	359,80	19,94	395,83	21,94	458,06	25,39	484,37	26,85	498,81	27,59
2	Sedang	414,77	22,99	411,63	22,82	389,34	21,58	161,05	8,92	175,12	9,70

3	Rusak	563,57	31,24	544,57	30,19	521,72	28,92	168,49	9,34	125,54	6,95
4	Rusak Berat	465,54	25,80	451,75	25,04	434,66	24,09	989,87	54,87	1.005,31	55,73
Total Panjang Jalan Kabupaten		1.803,78		1.803,78		1.803,78		1.803,78		1.803,78	

Sumber: Dinas PU Kab. Simalungun, 2021.

Kendala dan permasalahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanganan infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan :
   1. Minimnya alokasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang digunakan untuk penanganan infrastruktur.
   2. Adanya pengalihan anggaran yang disebabkan guna penanganan wabah Covid-19
   3. Adanya pelanggaran kelebihan beban muatan sumbu terberat pada kelas jalan yang ditentukan.
   4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat saluran drainase yang telah terbangun di ruas jalan.
   5. Kurangnya koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program-program pembangunan dengan pihak-pihak terkait.
   6. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus yang sesuai dengan bidang kerjanya.

b. Solusi :
   1. Kegiatan-kegiatan fisik yang belum terbayarkan pada Tahun 2020 ditampung dan dibayarkan pada APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021
   2. Perlu adanya peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan infrastruktur di Kabupaten Simalungun

3. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kesesuaian antara tujuan dan hasil, manfaat atau dampak yang sesuai dengan standar.
4. Menyesuaikan konstruksi bangunan dengan kondisi yang ada.
5. Pemilihan teknologi yang tepat guna untuk mengatasi kerusakan jalan akibat kondisi tanah tertentu dengan menggunakan konstruksi beton.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana saluran drainase.
7. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program-program pembangunan dengan pihak-pihak terkait.
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus yang sesuai dengan bidang kerjanya.

2. Kondisi irigasi dalam keadaan Sedang dan Baik

Capaian indikator kondisi irigasi dalam keadaan baik dan sedang merupakan sasaran dari Misi 1 dimana capaian kinerjanya diukur melalui akumulasi pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Simalungun yaitu prasarana jaringan irigasi teknis, sederhana dan irigasi desa. Adapun kegiatan tahun anggaran 2020 adalah kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi dengan realisasi kegiatan mengganti pintu penguras bendung sebanyak 1 buah, pembuatan tembok penahan sepanjang 5,50 meter, perbaikan saluran pasangan sepanjang 254 m, perbaikan tembok saluran sepanjang 55 m, membuat tembok penahan sepanjang 8,5 m serta membuat tembok saluran kiri-kanan sepanjang 3.971 m. Pembangunan pengelolaan irigasi diarahkan untuk mendukung pertanian padi sawah yang merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Simalungun dimana Kabupaten Simalungun adalah merupakan Lumbung Beras di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pembangunan irigasi dan kondisi irigasi Kabupaten Simalungun sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6:
Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2020

No	Kegiatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Perbaikan Bendung	5 Unit	6 unit	1 unit	7 unit	-
2	Bangunan Pengatur dan Pelengkap	82 unit	90 unit	5 unit	81 unit	-
3	Perbaikan Saluran Pasangan	16.344,65	18.466,80	7.903,8m	3.329,8 m	699 m
4	Bangunan Tembok Penahan	6800 m	6950 m	596 m	1.387,6 m	5,5 m
5	Perbaikan Tembok Saluran	6.945,33 m	8.880,44	364,6 m	5.319,4 m	3.971 m
6	Galian Sedimen	12.057,80 m	14.058,90	509 m	5.164,4 m	-
7	Babatan/Pembersihan Saluran	1200m	1400 m	-	1.200 m	-
8	Bronjong Kawat Saluran Tertutup	-		75,5 m 61 m	-	-

Sumber: Dinas PSDA Kab. Simalungun, 2021.

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan, perbaikan serta pengadaan sarana-prasarana irigasi di Kabupaten Simalungun maka kondisi irigasi dalam keadaan baik dan sedang adalah 67 persen.

Kendala dan permasalahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanganan jaringan irigasi di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan :
    1. Banyaknya kerusakan pada jaringan irigasi pada titik-titik tertentu yang mana jika tidak segera dilakukan perbaikan maka akan menambah kerusakan/kelongsoran dan biaya perbaikannya semakin besar
    2. Bendungan irigasi yang ada sudah hampir mendekati umur rencana sehingga diperlukan perbaikan pada bendung-bendung yang ada khususnya perbaikan pintu-pintu untuk mengurangi

pendangkalan sungai-sungai akibat tebalnya sedimen pada sungai.

3. Masih rendahnya kepedulian masyarakat petani/P3A terhadap pelestarian jaringan irigasi/pemanfaatan air irigasi.
4. Masih adanya masyarakat petani yang merusak/mengangu saluran-saluran irigasi untuk kepentingan kolam ikan baik secara pribadi maupun kelompok.
5. Adanya alih fungsi lahan pertanian produktif dan beririgasi menjadi areal pemukiman, industri dan tanaman sawit
6. Adanya kerusakan areal hutan pada daerah tangkapan air (DAS) sehingga mengurangi debit air pada sumber air irigasi.
7. Minimnya alokasi anggaran yang tersedia untuk O&P maupun untuk perbaikan/rehabilitasi jaringan irigasi. Disamping itu, wabah Covid-19 menyebabkan adanya pengalihan anggaran guna penanggulangan pandemi tersebut.
8. Banyaknya kerusakan pada Parit Pasangan/drainase/gorong-gorong pada titik tertentu dan pada Nagori tertentu yang belum terbangun, maka perlu dilakukan perbaikan/pembangunan agar tidak menambah kerusakan/pembangunan agar tidak menambah kerusakan/banjir dan biaya perbaikan semakin besar.
9. Bendung Irigasi yang ada sudah hampir mendekati umur rencana sehingga diperlukan perbaikan pada bendung-bendung yang ada khususnya perbaikan pintu-pintu untuk mengurangi pendangkalan sungai-sungai akibat tebalnya sedimen pada sungai.

b. Solusi :
   1. Menambah alokasi anggaran untuk kegiatan Operasi & Pemeliharaan maupun rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi.
   2. Melaksanakan survey pada lokasi-lokasi embung untuk dijadikan bangunan penyimpanan air sebagai tambahan suplai air pada jaringan irigasi yang mengalami kekurangan debit air.

3. Melaksanakan sosialisasi kepada petani pemakai air mengenai cara pengambilan air dari saluran irigasi serta pemanfaatan/pemeliharaan jaringan irigasi khususnya pada jaringan tersier.
4. Melakukan koordinasi antar instansi dalam menekan angka kerusakan pada daerah-daerah tangkapan air (DAS) dan pemberian ijin pembukaan area pemukiman maupun industri.

SASARAN-2 : Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih.

Indikator kinerja sasaran meningkatnya akses pelayanan air bersih adalah sasaran kedua, indikator ketiga, pada misi pertama, menyajikan gambaran data kinerja peningkatan dan percepatan pembangunan pelayanan air minum. Sasaran ini memiliki 1 "(satu) indikator, yaitu persentase cakupan pelayanan air minum dengan capaian kinerja 77,7 %.

Tabel 3.7:
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Akses Pelayanan Air Bersih.

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020		
		Target	Realisasi	%
1	Persentase cakupan pelayanan air minum	100 %	77,7 %	77,7 %

Sumber: Dinas PU, 2021.

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana air minum dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa air bersih, pembangunan sumur bor dan pembangunan Bak Penampung dengan realisasi kegiatan sampai dengan tahun 2020 seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.8:
Pembangunan Sarana Air Minum Tahun 2016-2019.

NO	URAIAN KEGIATAN	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengadaaan dan pemasangan Pipa air bersih Kebutuhan masyarakat(Grafitasi/SPAM)	10 SPAM	7 SPAM	18 SPAM	14 SPAM	28 SPAM
2	Pembangunan Sumur Bor dan Bak Penampung	8 lokasi	12 lokasi	-	7 Lokasi	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum,2021.

a. Permasalahan :

Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan sarana air minum dalam rangka pemenuhan cakupan pelayanan air minum adalah luasnya wilayah pelayanan dimana karakteristik permukiman penduduk yang menyebar dengan jarak yang relatif jauh dan kondisi geografis yang beda-beda sehingga menyulitkan dalam hal distribusi. Disamping itu, anggaran yang terbatas guna penanggulangan pandemi Covid-19.

b. Solusi :

Menyikapi permasalahan dan kendala dalam pengembangan sarana air minum dilakukan dengan ekstensifikasi sumber-sumber air minum serta pelaksanaan kebijakan pembangunan sarana air minum secara bertahap dan berkelanjutan.

MISI - 2 : PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT.
SASARAN-3 : Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar

Indikator Kinerja sasaran "Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar" merupakan bagian dari Misi-2, yaitu Peningkatan Kesehatan Masyarakat, mempunyai 1 (satu) indikator yaitu jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi (dari total jumlah 32 Kecamatan), dimana pada tahun 2020

ditargetkan 46 Puskesmas dan terealisasi 41 Puskesmas yang telah terakreditasi atau capaian kinerja sebesar 89 %.

Tabel 3.9:
Capaian Kinerja Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Yang Terakreditasi (32 Kecamatan)

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020		
		Target	Realisasi	%
1	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi (46 Puskesmas)	46	41	89

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

Tabel 3.10:
Data Status Puskesmas Kabupaten Simalungun Tahun 2020

No	Nama Puskesmas (Akreditasi)	Nama Puskesmas (Belum Akreditasi)
(1)	(2)	(3)
1	Saribu Dolok	-
2	Pamatang Silimahuta	-
3	Tiga Runggu	-
4	Haranggaol	-
5	Sipintu Angin	-
6	Sarimatondang	-
7	Pamatang Sidamanik	-
8	Parapat	-
9	Tanah Jawa	-
10	Hatonduhan	-
11	Buttu Turunan	-
12	Tiga Dolok	-
13	Tiga Balata	-
14	Panei Tongah	-
15	Panombean Pane	-
16	Pamatang Raya	-
17	Saran Padang	-
18	Nagori dolok	-
19	Sindar Raya	-
20	Tapian Dolok	-
21	Serbelawan	-
22	Silou Malaha	-
23	Batu Anam	-
24	Rambung Merah	-
25	Simpang Bah Jambi	-
26	Bandar Siantar	-

27	Gunung Maligas	-
28	Raja Maligas	-
29	Huta Bayu	-
30	Jawa Maraja Bah Jambi	-
31	Pematang Bandar	-
32	Kerasaan	-
33	Bandar Huluan	-
34	Perdagangan	-
35	Marihat Bandar	-
36	Bandar Masilam	-
37	Bandar Tinggi	-
38	Bosar Maligas	-
39	Parbutaran	-
40	Ujung Padang	-
41	Bah Bolon	-
42	-	Marubun Jaya
43	-	Cingkes
44	-	Sinasih
45	-	Bah Tonang
46	-	Sayur Matinggi

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

SASARAN - 4 : Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Indikator kinerja sasaran "Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin" merupakan sasaran keempat dan indikator kelima dari Misi 2 dengan indikator yaitu Persentase Pasien BPJS Kesehatan Non PBI dan Mendiri, dimana pada tahun 2020 ditargetkan 100 % terealisasi 67,98 dengan persentase capaian kinerja 67, 98 %.

Tabel 3.11:
Persentase Pasien BPJS Kesehatan Non PBI dan Mandiri

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020		
		Target	Realisasi	%
1	Persentase Pasien BPJS Kesehatan Non PBI dan Mandiri	100 %	67,98 %	67,98

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

Percepatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat kurang mampu, yaitu melalui kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Kabupaten Simalungun mempunyai 46 Puskesmas yang tersebar di 32 Kecamatan dengan sistem pelayanan 24 jam serta 3 (tiga)

Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu RSUD Parapat, RSUD Perdagangan dan RSUD Tuan Rondahaim Pamatang Raya. Selain itu secara rutin dilakukan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat di tingkat Nagori dan Kecamatan.

Pelayanan Kesehatan dan Sosialisasi Pencegahan Stunting Tahun 2020

Tabel 3.12:
Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2019

RSUD	Rawat Inap (Orang)				Rawat Jalan (Orang)			
	Tahun				Tahun			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
RSUD Parapat	5.406	927	952	1.227	9.308	5.334	5.199	5.321
RSUD Perdagangan	966	2.500	2.690	1.499	3.242	9.560	12.241	9.821
RSUD Tuan Rondahaim	483	1.508	1.530	2.281	178	702	5.764	6.881
Jumlah	6.855	4.935	5.172	5.007	12.728	15.536	23.204	22.023

Sumber: RSUD Parapat, RSUD Perdagangan dan RSUD Tuan Rondahaim, 2020.

SASARAN-5 : Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja sasaran "Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat" merupakan bagian dari pencapaian sasaran-5, mempunyai 1(satu) indikator yaitu Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan dimana pada tahun 2020 ditargetkan 100 %, dan terealisasi 100 %.

Tabel 3.13:
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020		
		Target	Realisasi	%
1	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	100%	84,3%	84,3%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020.

Capaian kinerja persalinan pada fasilitas kesehatan beserta pelayanan lainnya untuk mendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.

Pada tahun 2020 jumlah ibu bersalin/nifas adalah 18.028 Bulin. Dari jumlah ibu bersalin/nifas tersebut, 18.028 Bulin persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit. Dengan demikian cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah 100%, Angka ini naik dari Tahun 2019 sebesar 84,26 Sementara itu, jumlah ibu bersalin yang bersalin di Fasyankes sebanyak 12.480 Bulin.

Tenaga kesehatan yang menolong persalinan terbesar adalah bidan (62,7%) disusul dokter kandungan (28,9%); dokter umum dan perawat masing-masing 1,2% dan 0,3%, sedangkan untuk jenis fasyankes mencakup : Praktik bidan mandiri (29%); RS swasta (18%); Rumah (16%); RS Pemerintah (15%); Puskesmas/Pustu/Pusling (12%);Klinik (5%); Poskesdes/Polindes (4%) dan Praktik dokter mandiri (1%) (Riskesdas,2018).

Angka kematian Ibu Maternal mencakup kematian Ibu hamil, Ibu bersalin dan Ibu Nifas. Menurunnya Angka Kematian Ibu Maternal dapat menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlunya perilaku hidup sehat dan meningkatnya tingkat kesehatan ibu dan status gizi. Rendahnya AKI juga menggambarkan peningkatan

pelayanan kesehatan terutama kepada ibu hamil. Penyebab utama kematian ibu maternal adalah : Perdarahan parah (sebagian besar perdarahan pasca salin); infeksi (biasanya pasca salin); Tekanan darah tinggi saat kehamilan (preeclampsia/eclampsia); Partus lama/macet; dan Aborsi yg tidak aman.

Jumlah kematian Ibu Maternal tahun 2020 sebanyak 2 Orang, angka ini menurun pada tahun 2019 sebanyak 8 Orang. Dengan demikian angka kematian Ibu Maternal tahun 2020 adalah 11,96% per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu maternal ini masih jauh dibawah target Nasional (Renstra Kemenkes 2015-2019) yakni 306 per 100.000 kelahiran hidup maupun target indikator SDGs (2030) yakni 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR) adalah banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup dalam satu tahun. Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program kesehatan ibu dan anak karena ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Jumlah kematian bayi tahun 2020 adalah sebanyak 35 Orang atau 2,05 per 1000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun 2017 (0,46) dan 2016 (0,65), namun masih lebih rendah dari 2 tahun sebelumnya yakni 2,58 (2015) dan 3,41 (2014). Angka ini masih dibawah target Nasional (Renstra Kemenkes 2015-2019) yakni 24 per 1000 kelahiran hidup dan indikator SDGs (2030) yakni 12 per 1000 kelahiran hidup.

SASARAN-6 : Terlaksananya Pelayanan Imunisasi Bagi Anak Usia 0-11 Bulan.

Indikator kinerja sasaran Terlaksananya Pelayanan Imunisasi Bagi Anak Usia 0-11 bulan merupakan bagian dari pencapaian Misi 2 mempunyai 1 (satu) indikator yaitu Meningkatnya Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap dimana pada tahun 2020 ditargetkan 100% terealisasi 88,33%.

Tabel 3.14:
Capaian Kinerja Meningkatnya Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019		
		Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap	100%	88,33 %	88,33%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

Keberhasilan program imunisasi dapat dilihat dari cakupan pencapaian Universal Child Immunization (UCI) yang merupakan gambaran terhadap cakupan bayi (0-11 bln) yang mendapat imunsasi lengkap sebesar 96,4 %, sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Pada tahun 2020 jumlah Nagori/kelurahan di Kabupaten Simalungun adalah 413 Nagori/kelurahan. Dengan demikian cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di adalah 96,4 %.

Secara umum target kinerja tahun 2020 sudah tercapai sesuai target dalam perjanjian kinerja, namun masih banyak indikator yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJM dan SPM. Adapun permasalahan dan kendala dalam pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan adalah belum berkembangnya sistem manajemen dan kebijakan kesehatan terutama Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sehingga beberapa indikator keberhasilan tidak tersedia.

Kebijakan yang dilaksanakan untuk menyikapi kendala dan permasalahan adalah Pengembangan sistem manajemen kebijakan kesehatan seperti pemantapan sistem pendataan dan pelaporan termasuk melalui institutional based maupun Community Based serta intensifikasi kerjasama lintas program dan sektoral.

SASARAN - 7 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Keluarga Berencana

Indikator kinerja sasaran "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Keluarga Berencana" merupakan bagian dari pencapaian Misi 2 yang mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Persentase Pasangan Usia Subur yang Menjadi Akseptor KB dan Sarana Balai Penyuluh KB yang tersedia di Kecamatan dimana pada tahun 2020 rata-rata capaian kinerja mencapai 39,71%.

Pengukuran kinerja untuk kinerja Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi Akseptor KB didasarkan pada total jumlah pasangan usia subur dikurangi pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB selama tahun 2020, sedangkan pengukuran kinerja ketersediaan sarana Balai Penyuluhan KB yang tersedia di Kecamatan adalah jumlah kecamatan (32 kecamatan) dikurangi jumlah kecamatan yang telah memiliki Kantor Balai Penyuluhan KB ditingkat kecamatan. Hasil pengukuran capaian kinerja kedua indikator tersebut seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.15:
Capaian Kinerja Persentase Pasangan Usia Subur yang Menjadi Akseptor KB

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020		
		Target	Realisasi	%
1	Persentase Pasangan Usia Subur yang Menjadi Akseptor KB	100%	79,42%	79,42
2	Sarana Balai Penyuluh KB yang tersedia di Kecamatan	0	0	0

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Kebijakan dalam mendukung kinerja pelayanan KB yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2020 adalah dalam bentuk kegiatan fasilitasi masyarakat untuk ikut program KB antara lain:

1) Melaksanakan program/kegiatan yang telah ditampung anggarannya di DPA
2) Melakukan kerja sama dengan lintas sektoral/instansi terkait seperti:

- Kegiatan Kesatuan Gerak PKK.
- TNI Manunggal KB-Kesehatan.
- Pameran Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- Acara Kunjungan Bupati Simalungun.

Dari kebijakan tersebut kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Simalungun dapat digambarkan melalui data berikut:

1) Peserta KB Baru.

Pencapaian peserta KB Baru untuk data 5 (lima) tahun terakhir seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.16:
Peserta KB Baru Tahun 2016-2020

NO	Jenis Alkon	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	IUD	417	0,01	385	79,55	426	55,47	349	48,68	407	69,22
2	M O W	316	0,99	361	65,40	282	37,55	239	36,88	122	39,74
3	M O P	53	0,17	0	0	50	32,3	0	0	0	0
4	Implant	857	2,68	3791	115,83	3.829	124,64	1.868	49,26	3.301	204,65
5	Suntik	2.029	6,34	10.251	118,41	8.078	79,39	9.997	93,41	6.819	59,30
6	Kondom	2.717	8,49	2.138	160.27	2.566	80,69	2.598	242,80	2.119	149,44
7	Pil	1.103	3,45	6.641	106,65	6,016	62,30	7.425	84,06	5.317	50,04

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

2) Peserta KB Aktif.

Pencapaian Peserta KB Aktif untuk data 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17:
Perkembangan Peserta KB Aktif Sampai Bulan Desember Tahun 2016-2020

NO	Jenis Alkon	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Peserta Aktif	%	Peserta Aktif	%	Peserta Aktif	%	Peserta Aktif	%	Peserta Aktif	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	IUD	417	0,01	11.174	10.266	11,77	13,78	10.771	12,67	9.247	8,34
2	M O W	316	0,99	15,074	14.793	16,96	18,59	15.009	17,65	14.780	13,33
3	M O P	53	0,17	679	750	0,86	0,84	651	0,77	712	0,64
4	Implant	857	2,68	20.113	22.184	25,43	24,80	20.841	24,51	22.833	20,59
5	Suntik	2.029	6,34	33.530	38,189	43,80	41,34	37.129	41,67	37,959	34,23
6	Kondom	2.717	8,49	10.819	12.002	13,76	13,34	11.629	13,68	11.308	10,20
7	Pil	1.103	3,45	27.970	29.711	34,06	34,49	29.730	34,97	27.587	24,88
PUS:		154.107		155.211		125.760		127.904		124.426	

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020.

3) Pengadaan Sarana Balai Penyuluh KB yang tersedia di Kecamatan.

Pengadaan sarana Balai Penyuluhan KB ditingkat Kecamatan sampai tahun 2020 mencapai 100%, dengan pencapaian ini bahwa seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Simalungun telah memiliki Balai Penyuluh KB Tingkat Kecamatan. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama "Pengadaan Sarana Balai Penyuluh KB" untuk tahun 2020 tidak lagi direalisasikan.

Permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi kinerja pelayanan Keluarga Berencana antara lain:

1) Belum tersedianya mobil untuk distribusi alat obat kontrasepsi ke semua Fasilitas Kesehatan KB.
2) Masih kurangnya alat kontrasepsi untuk peserta KB.
3) Kurangnya petugas lapangan KB/PLKB.
4) Tidak adanya insentif bagi kader KB (PPKBD, Sub PPKBD) sebagai ujung tombak pelayanan KB.
5) Kurangnya anggaran untuk sosialisasi program KB melalui media.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan tersebut maka solusi tindak lanjut yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan KB yaitu:

1) Pengajuan usulan program dan kegiatan melalui dana DAK.
2) Pengalokasian anggaran untuk pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk mendukung pelayanan KB.
3) Penambahan petugas penyuluh (PKB) dan PLKB.
4) Pengajuan alokasi dari anggaran Nagori (ADD).
5) Usulan penambahan anggaran untuk sosialisasi program KB melalui media.

MISI-3 : PENGEMBANGAN DAN PEMERATAAN AKSES PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA.

SASARAN-8 : Meningkatkan Kualitas Sarana Pendidikan

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan merupakan bagian dari pencapaian Misi 3 mempunyai 1 (satu) indikator yaitu Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik dan sedang (SD, SMP) dimana pada tahun 2020 ditargetkan 89% terealisasi 95,50 % dengan persentase capaian kinerja 107%.

Tabel 3.18:
Capaian Kinerja Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik dan sedang (SD, SMP)

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020		
		Target	Realisasi	%
1	Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik dan sedang (SD,SMP)	89%	95,50%	107

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021.

Meningkatnya kualitas sarana pendidikan merupakan akumulasi dari kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana-prasarana pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu pembangunan Ruang Kelas Baru, pemeliharaan rutin berkala Ruang Kelas dan rehabilitasi Ruang Kelas. Data kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Kabupaten Simalungun sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19:
Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP
Kabupaten Simalungun Sampai dengan
Tahun 2020.

NO	Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas					Jumlah Total
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sekolah Dasar	1.943	3.234	71	42	0	5.290
2	SMP	657	788	63	28	1	1.537
	JUMLAH	2.600	4.022	134	70	1	6.827

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021.

Data kondisi Ruang Kelas SD dan SMP tersebut merupakan data akumulasi dari keseluruhan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi Ruang Kelas yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2020. Adapun realisasi kinerja pengadaan sarana pendidikan SD dan pengadaan sarana pendidikan SMP Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20 :
Kinerja Pengadaan Sarana Pendidikan SD Tahun 2020

No.	Kegiatan	Sekolah	Volume/Ruang	
		Jumlah	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rehabilitasi Ruang Kelas	14	37	Ruang
2	Rehab Jamban Sekolah	7	48	Ruang
3	Pembangunan RKB SD	6	6	Ruang
4	Pembangunan Toilet (Jamban)	7	7	Paket
5	Pemb. Ruang Perpustakaan	7	7	Ruang
6	Pembangunan Ruang Guru	1	1	Ruang
7	Pengadaan Media Belajar	6	6	Paket
Jumlah		**48**	**106**	Ruang
			6	Paket

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021.

Sedangkan untuk pembangunan sarana pendidikan di tingkat SMP realisasi kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21:
Kinerja Pengadaan Sarana Pendidikan SMP Tahun 2020

NO	KEGIATAN	SEKOLAH	VOLUME/RUANG	
		Jumlah	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rehab Ruang Kelas	7	20	Ruang
2	Rehab Laboratorium IPA	3	4	Ruang
3	Rehab Ruang Guru	4	6	Ruang
4	Rehab Kamar Mandi/WC	4	4	Ruang
5	Pembangunan Lab IPA	2	4	Ruang
6	Pemb. Ruang Perpustakaan	1	20	Ruang
7	Pembangunan WC/Jamban	2	2	Ruang
8	Pemb. Lab. Komputer	4	1	Ruang
9	Pengadaan Media Belajar	10	20	Paket
JUMLAH		**37**	**44**	**Ruang**
			20	**Paket**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021.

SASARAN-9 : Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan Guru

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan Guru merupakan bagian dari pencapaian Misi 3 mempunyai 1 (satu) indikator yaitu Tingkat Kualifikasi Pendidikan Guru dimana pada tahun 2020 ditargetkan 90% terealisasi 83,93% dengan persentase capaian kinerja 92,99 %.

Tabel 3.22:
Capaian Kinerja Tingkat Kualifikasi Pendidikan Guru

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020		
		Target	Realisasi	%
1	Tingkat Kualifikasi pendidikan guru PAUD, SD dan SMP	90%	83,93	92,99

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021.

Kinerja Tingkat Kualifikasi Pendidikan merupakan akumulasi tingkatan pendidikan guru S.1 untuk guru PAUD, SD dan SMP. Peningkatan guru berpendidikan sarjana ini tampak nyata peningkatannya pada guru PAUD dan SD yang mengalami peningkatan cukup baik, dimana untuk PAUD sudah mencapai 45,79% dan di SD meningkat dari 84,30 % menjadi 87,91 %. Data mutu pendidikan dapat dilihat dari tingkat pendidikan guru yang tingkat pendidikannya sudah sesuai harapan yaitu berpendidikan S1/A.IV, Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23:

Tingkat Pendidikan Guru S.1/A.IV Kabupaten Simalungun Tahun 2020

NO	Guru	Jlh Guru	Pendidikan Guru	
			>S1/A.IV	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PAUD	1.234	565	45,79
2	Sekolah Dasar	6.790	5.969	87,91
3	SMP	2.520	2.288	90,79
		10.544	**8.822**	**74,83**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

SASARAN-10 : Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan merupakan bagian dari pencapaian Misi 3 mempunyai 1 (satu) indikator yaitu Nilai Rata-rata Ujian (SD/SMP) dimana pada tahun 2020, Ujian Nasional ditiadakan. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang membuat Ujian Nasional berubah menjadi Ujian Akhir Sekolah dengan target 7,50 terealisasi 6,74 dengan persentase capaian kinerja 89,93%.

Tabel 3.24:

Capaian Kinerja Nilai Rata-rata Ujian Nasional (SD/SMP) dan Meningkatnya Melek Aksara

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020		
		Target	Realisasi	%
1	Nilai Rata-rata Ujian Nasional (SD/SMP)	7,50	6,74	89,93

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021.

SASARAN-11 : Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah merupakan bagian dari pencapaian Misi 3 mempunyai 3 (tiga) indikator yaitu Nilai Persentase Angka Partisipasi Sekolah TK/PAUD, Persentase Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMP dimana pada tahun 2020 rata-rata capaian kinerja mencapai 89,47%.

Tabel 3.25 :
Capaian Kinerja Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020		
		Target	Realisasi	%
1	Persentase APK TK/PAUD	70%	56,58%	80,82
2	Persentase APM SD/MI	95%	99,35%	104,57
3	Persentase APM SMP	95%	78,88%	83,03

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

Kinerja sasaran meningkatnya angka partisipasi sekolah merupakan gambaran tingkat persentase angka partisipasi sekolah dari masing-masing tingkatan mulai dari tingkat PAUD, SD dan SMP sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan capaian kinerja masing-masing indikator sebagai berikut :

Tabel 3.26 :
Kinerja Pencapaian Angka Partisipasi PAUD, SD/MI, SMP/MTs
Tahun 2019/2020

NO	Pendidikan	Jumlah Siswa 2020	Pencapaian APK %	
			APK	APM
1	TK/TPA/KB/SPS	14.330	56,58	-
2	SD/MI	95.998	93,85	99,35
3	SMP/MTs	38.741	82,87	78,88
Jumlah/Rata-rata		149.069	77,76	

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

Adapun kendala dan permasalahan secara umum yang mempengaruhi kinerja dibidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana BOS ke sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi ke sekolah tidak tepat waktu setiap triwulan, sehingga penggunaan Dana BOS untuk operasional sekolah tidak dapat digunakan sesuai perencanaan waktu penggunaannya termasuk dalam penyelesaian LPJ dan pencatatan aset/persediaan.
2. Kebutuhan guru ASN/PNS khususnya di tingkat SD mendesak dipenuhi, dan kebijakan penguasa guru honorer (PTT) yang ada belum memenuhi kekurangan guru (masih dibutuhkan pertambahan).

Menyikapi kendala dan permasalahan tersebut, kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan perencanaan melalui RKAS yang menjadi pedoman penggunaan dana BOS, sehingga dapat diambil langkah-langkah melaksanakan kegiatan secara konsisten (tidak merubah RKAS untuk menunggupencairan)
2. Memberdayakan penugasan Guru honorer PTT dan Guru honorer Sekolah (komite) untuk mengatasi kekurangan guru sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Mengusulkan ke BKPPD untuk alokasi penerimaan CPNS Guru.

SASARAN-12 : Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Minat Baca Masyarakat merupakan bagian dari Misi 5 yang hanya mempunyai 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Pengunjung Perpustakaan/Tahun dengan target 15.000 orang, dengan target diatas tahun 2019 yaitu 11.000. Dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020, angka realisasi mencapai 2896 orang.

Tabel :3.27
Perbandingan antara Realisasi Kinerja
serta capaian kinerja tahun 2019 dan tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	11.000	13.186	118.79 %	15.000	2.896	5,18 %

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian target untuk tahun 2020 hanya mencapai 5,18 % dari target yang telah ditetapkan, hal ini sangat berbeda dari capaian target untuk tahun 2019 yang mencapai 118,9 % dari target yang telah ditetapkan. Penurunan target atau tidak terpenuhinya target untuk tahun 2020 dikarenakan munculnya pandemi COVID-19 yang berdampak pada menurunnya kunjungan masyarakat dan juga anak sekolah ke perpustakaan, selain itu juga sistem belajar yang diterapkan berupa daring juga berdampak menurunnya kunjungan ke perpustakaan pada tahun 2020.

Beberapa masalah yang dihadapai dinas perpustakaan dan arsip adalah sebagai berikut :

- Munculnya Pandemi COVID-19 yang berdampak menurunnya tingkat kunjungan masyarakat dan anak sekolah.
- Banyaknya masyarakat tidak memanfaatkan perpustakaan yang ada di Nagori-nagori maupun yang ada di Kecamatan
- Kurangnya minat baca dimana masyarakat belum mengetahui dan menyadari betapa pentingnya perpustakaan untuk menambah ilmu dan wawasan masyarakat
- Tenaga perpustakaan, arsiparis dan dokumentasi sangat minim
- Mobile untuk ruangan perpustakaan sangat minim
- Kurang tersedia buku-buku perpustakaan
- Adanya rasionalisasi anggaran keuangan

Beberapa kebijkan dan strartegi untuk menyikapi permasalahan yang ada di perpustakaan dan arsip antara lain :

- Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di nagori dan tingkat kecamatan
- Mengadakan perpustakaan keliling dengan menerapkan protokol kesehatan
- Memberikan bantuan keperpustakaan yang ada di nagori/kelurahan dan kecamatan berupa buku/rak buku
- Menghimbau masyarakat agar memanfaatkan perpustakaan yang ada
- Menyurati kesekolah-sekolah agar siswa/siswi dapat memanfaatkan perpustakaan dan menghimbau agar ikut serta sebagai anggota perpustakaan dengan cara membuat kartu anggota perpustakaan
- Menerapkan protokol kesehatan di area perpustakaan.

MISI-4 : MENJAMIN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

SASARAN-13 : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan bagian dari pencapaian Misi 4 memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Pelaksanaan Patroli Penegakan Perda di Wilayah Kecamatan, Kejadian/Insiden disebabkan oleh SARA serta Terbinanya Ormas dan LSM. dimana pada tahun 2019 rata- rata capaian kinerja 93,4%, sedangakan Untuk tahun 2020 rata rata capaian kinerja adalah 66,66%.

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Menjamin Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020 dan perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Pelaksanaan Patroli Penegakkan Perda di Wilayah Kecamatan	%	100	100	100 %	100	100	100 %
2	Kejadian/ Indsiden disebabkan oleh SARA	%	0	0	100 %	0	0	100 %
3	Terbinanya Ormas dan LSM	%	90	72,2	80,2 %	90	0	0 %

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021 dan Badan Kesbangpol 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa indikator yang capaian targetnya tidak mencapai target yang telah di tetapkan. Penyelenggaraan kegiatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satuan Polisi Pamong Praja melaui kegiatan rutin yang dilaksananakan di OPD maupun melalui koordinasi dengan Kecamatan maupun instansi terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan patroli penegakkan Perda di Wilayah Kecamatan terlaksana 100 (Seratus) persen dari target yang telah di tetapkan

yaitu 100 (seratus) persen. Pelaksanaan patroli di kecamatan diantaranya seperti operasi yustisi, operasi kasih sayang kepada siswa siswa sekolah, operasi ketaatan penerapan Protokol Kesehatan dimasa Pandemi COVID-19, dan juga penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dimasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun.

Untuk kegiatan pengendalian keamanan dan ketertiban dilakukan kegiatan dalam bentuk sosialisasi, kunjungan ke masyarakat, pembinaan Ormas dan LSM dan peningkatan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat serta koordinasi pengamanan pada saat adanya even baik sifatnya skala kabupaten, provinsi, nasional termasuk juga hari-hari besar keagamaan. Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Simalungun selama tahun 2020 terjaga dengan baik termasuk pada saat mulai menyebarnya wabah COVID-19 dan juga pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 serta tidak ada konflik SARA maupun konflik yang disebabkan oleh sengketa Pemilu.

Kendala dan hambatan yang mempengaruhi kinerja pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain:

1) Adanya gejala sikap dan prilaku warga masyarakat yang menggambarkan memudarnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa, Falsafah Negara dan Pemersatu Bangsa.
2) Dalam hal kebebasan pers, kebebasan untuk mengemukakan pendapat serta kebebasan untuk berserikat dan berkumpul memberikan peluang banyaknya pembentukan LSM oleh masyarakat.
3) Kerawanan-kerawanan sosial seperti tingginya angka (PEKAT) seperti narkoba, perjudian, prosistusi, miras dan sebagainya yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

4) Kemungkinan timbulnya hura-hara, baik sebagai akibat fenomena alam maupun akibat ulah manusia.

Dalam rangka menyikapi permasalahan tersebut kebijakan yang dilakukan dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan adalah:

a. Meningkatkan volume pelaksanaan perumusan kebijakan untuk pemantapan idiologi bangsa dan integritas bangsa kepada masyarakat, Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama untuk meningkatkan rasa kebangsaan.
b. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategis dan politik.
c. Pelaksanaan perumusan kebijakan pembinaan wawasan kebangsaan.
d. Pelaksanaan perumusan kebijakan pembinaan hubunga antara lembaga masyarakat.
e. Pelaksanaan perumusan kebijakan pembinaan kesiagaan, antisipasi terjadinya huru-hara dan kerawanan sosial.
f. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

MISI - 5 : MENINGKATKAN DAYA SAING.

SASARAN-14 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik merupakan bagian dari pencapaian Misi 5 yang mempunyai 09 (sembilan) indikator yaitu Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Nilai Evaluasi Laporan Kinerja, Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, Persentase OPD dalam kegiatan Internal Secara Berkala, Ketepatan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan, Persentase Perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu dan sesuai ketentuan, Meningkatnya Kepemilikan

Dokumen Pencatatan Sipil, Meningkatnya Tertib Administrasi Dokumen Kependudukan (e-KTP), Persentase Wilayah Tanggap Darurat dan Pasca Bencana yang bisa ditanggulangi. Data capaian kinerja masing-masing indikator seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Meningkatmya Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai LPPD	%	2,99	2,73	91 %	3,0	Dalam Proses	
2	Nilai Evaluasi Laporan Kinerja	Predikat	CC	CC	CC	AA	Dalam Proses	
3	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2018	Predikat	WTP	WDP	90 %	WTP	Dalam Proses	
4	Persentase OPD dalam kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala	%	100	100	100 %	100	77	77 %
5	Ketepatan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan	%	100	90	90 %	100	100	100 %
6	Persentase dokumen pelayanan Perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100 %
7	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Akte Kelahiran (0-18 Tahun)	Dokumen	50.000	40.587	81%	25.000	21.569	86,20 %
8	Meningkatnya Tertib Adminstrasi Dokumen Kependudukan (e-KTP)	Dokumen	50.000	42.113	84%	55.000	52.423	95,31 %
9	Persentase Wilayah Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Yang Bisa Ditanggulangi	%	80	33,33	41,46	90	42	46,67 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah;**

   Hasil evaluai LPPD Kabupaten Simalungun tahun 2020 yang dievaluasi tahun 2021 masih dalam tahap proses evaluasi di Instansi yang berwenang dalam hal mengvaluasi LPPD, tetapi untuk nilai laporan LPPD tahun 2019 mendapatkan Nilai 2,73 dan capaian 91%. Hal ini sedikit dibawah dari target yang telah di tetapkan yaitu 2,99

2. **Nilai Evaluasi AKIP;**

Untuk hasil nilai AKIP tahun 2020 yang di evaluasi di tahun 2021 masih dalam tahap evalusi di KemeterianPAN-RB, tetapi untuk capain nilai AKIP tahun 2019 mendapatakn predikat CC. Dari predikat tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pembenahan dan perbaikan yang harus dilakukan di beberapa dokumen perencanaan serta kelangkapan data pendukung.

3. **Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**

   Untuk laporan Keuangan Tahun 2020 masih dalam tahap penyampaian laporan ke BPK, tetapi untuk tahun 2019 mendapatakn predikat WDP. Hal ini juga menunjukkan masih ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam proses pelaporan penggunaan anggaran.

4. **Persentase OPD dalam kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala;**

   Capaian kinerja indikator Persentase OPD dalam kegiatan Pengawasan Internal secara berkala adalah terlaksananya kegiatan pengawasan secara berkala bagi seluruh OPD dijajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun, yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2020 yaitu kegiatan pengawasan secara rutin/berkala terhadap semua obyek pengawasan (audit).

   Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain:

   a) Rasio antara APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan Objek Pemeriksaan belum seimbang.
   b) Terbatasnya sumber daya manusia APIP untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait program dan kegiatan Nasional.

   Kebijakan yang dilakukan untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

   a) Fasilitasi ASN dari setiap OPD untuk mengikuti pelatihan untuk menjadi APIP.

b) Pembinaan APIP OPD secara berkelanjutan.

5. **Ketepatan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan.**

Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dituangkan dalam dokumen RKPD dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pedoman. Tahapan dan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun dimulai dengan pelaksanaan Musrembang ditingkat Nagori/Desa/Kelurahan dengan rincian kegiatan sebagai berikut seperti; Musyawarah Pembanguan (Musrembang) desa/nagori, Musyawarah Pembanguan (Musrembang) RKPD Tingkat Kecamatan, Forum OPD dan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) RKPD Kabupaten

6. **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.**

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal merupakan bagian dari pencapaian Misi 5 dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal diukur dari data jumlah permohonan izin yang masuk kemudian diproses sesuai dengan SOP (termasuk standar ketepatan waktu penyelesaian). Pada Tahun 2020 seluruh usulan permohonan izin dapat diproses sesuai dengan SOP yaitu berkas permohonan yang masuk sebanyak 2.541 permohonan dan izin yang terbit sebanyak 2.541

izin (100%). Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur dengan mengikutsertakan petugas Perizinan untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi tentang peraturan - peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan Standart Operasional Prosedur (SOP) dengan tujuan terus meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional.
2. Menyusun SOP & SP sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan publik.
3. Memutasi tugas personil front office dan back office agar ada penyegaran kinerja.
4. Mengisi personil front office dan back office sesuai dengan kebutuhan.

Adapun perizinan yang keluarkan selama Tahun 2016 s/d Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30

Capaian Kinerja Meningkatmya Akuntabilitas Kinerja

NO	NAMA NAMA IZIN	2016	2017	2018	2019	2020
1	IZIN GANGGUAN (HO)	677	423	-	-	-
2	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	443	487	543	10	38
3	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	556	636	718	8	-
4	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	134	227	185	612	402
5	IZIN TRAYEK (IT)	6	41	3	-	7
6	IZIN REKLAME (IR)	53	71	117	120	165
7	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)	47	42	23	5	47
8	IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM (IPDU)	-	104	144	104	144
9	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	20	58	62	7	17
10	IZIN LOKASI	-	9	5	-	12
11	IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI (IPDG)	-	22	29	11	29
12	IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM (IPDSPD)	-	4	4	3	4
13	IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS BEDAH (IPDSB)	-	2	3	1	3
14	SURAT IZIN KERJA BIDAN (SIK B)	-	428	2	515	-
15	IZIN PRINSIP (IP)	-	6	2	-	2
16	IZIN USAHA GILINGAN PADI (IUGP)	-	3	2	-	2

17	IZIN USAHA ANGKUTAN TRANSPORTASI UMUM ORANG (IUATUO)	-	5	-	-	
18	IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS ANAK (IPDSA)	-	2	2	5	2
19	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	1	8	11	-	-
20	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	7	9	8	-	8
21	IZIN PENYELENGGARAAN KLINIK (IPK)	-	8	-	-	-
22	SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP B)	-	11	1377	515	666
23	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP P)	-	5	2	1	478
24	SURAT IZIN KERJA PERAWAT (SIK P)	-	259	404	267	-
25	SURAT IZIN OPERIONAL PUSKESMAS (IOP)	-	22		-	-
26	SURAT IZIN KERJA AHLI GIZI (SIK AG)	-	1	1	41	1
27	SURAT IZIN KERJA ANALIS KESEHATAN (SIK AK)	-	12	12	12	12
28	SURAT IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT (SIK TKN)	-	1	33	46	33
29	IMB PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	-	2	-	-	-
30	SURAT IZIN KERJA TENAGA KEPARMASIAN (SIK TK)	-	15	41	32	41
31	SURAT IZIN TOKO OBAT (SITO)	-	8	15	1	-
32	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS PARU (IPDSP)	-	1	2	-	2
33	IZIN ARENA BALAP (IAB)	-	1		-	-
34	SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIP A)	-	6	23	20	23
35	SURAT IZIN APOTIK (SIA)	-	1	15	3	-
36	SURAT IZIN KERJA NUTRISIONIST (SIK N)	-	12	34	20	-
37	SURAT IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK (SIK RD)	-	1	7	9	7
38	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIK TS)	-	3	-	11	13
39	SURAT IZIN DOKTER SPESIALIS ANASTESIOLOGI (IPDSAT)	-	2	1	3	1
40	SURAT IZIN DOKTER SPESIALIS OBSTETRIDAN GINEKOLOGI(IDSOG)	-	3	-	7	3
41	IZIN USAHA PERKEBUNAN-PENGOLAHAN (IUP-P)	-	4	2	-	-
42	SURAT IZIN KLINIK (SIK)	-	2	9	1	-
43	IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)	-	2	-	-	-
44	IZIN PERTUNJUKAN AKROBAT/SIRKUS (IPAS)	-	1	-	-	-
45	IZIN POLIKLINIK UMUM (IPU)	-	1	-	-	-
46	IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK (IPLK)	-	1	-	-	-
47	IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITPMB)	-	2	1	-	1
48	IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS SARAF(IPDSS)	-	1	-	-	-
49	IZIN PENGGUNAAN PERUBAHAN TANAH (IPPD)	-	5	-	17	-
50	SURAT IZIN KERJA TENAGA PEKARYA KESEHATAN	-	2	5	11	7
51	IZIN LINGKUNGAN	10	18	27	4	55
52	IZIN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK (IDSPK)	-	1	-	2	-
53	AIR BAWAH TANAH (ABT)	2	-	-	-	-
54	IUT (IZIN USAHA TRAYEK)	9	-	-	-	-

55	IUK (IZIN USAHA KEPARIWISATAAN)	4	-	-	-	-
56	IUPR (IZIN USAHA PETERNAKAN)	1	-	-	-	-
57	SIK (SURAT IZIN KLINIK)	1	-	-	-	9
58	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)	-	-	11	-	-
59	SURAT IZIN TERAPIS GIGI DAN MULUT	-	-	1	-	-
60	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	-	-	2	2	2
61	SURAT IZIN KERJA PERAWAT GIGI	-	-	12	16	12
62	SURAT IZIN KERJA PERAWATAN ANASTESI	-	-	4	-	4
63	SURAT IZIN KERJA AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM	-	-	4	15	4
64	IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG/ORANG/UMUM	-	-	16	3	16
65	IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS	-	-	5	4	5
66	IZIN PERUBAHAN JENIS TANAMAN	-	-	3	-	3
67	IZIN PENGGUNAAN TANAH	-	-	66	-	66
68	IZIN OPERASIONAL	-	-	82	57	83
67	IZIN TENAGA SANITARIAN	-	-	13	-	-
68	IZIN DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	-	-	-	1	-
69	IZIN DOKTER THT	-	-	-	1	-
70	IZIN DOKTER KULIT & KELAMIN	-			1	-
71	IZIN DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	-	-	-	3	-
72	IZIN DOKTER FISIOTERAPI	-	-	-	13	-
73	IZIN PENATA ANASTESI	-	-	-	1	-
74	KOMERSIAL OPERASIONAL	-	-	-		38
75	KOMITMEN TDG					2
76	IZIN USAHA					19
77	OPERASIONAL SEKOLAH					4
78	OPERASIONAL KESEHATAN					12
	JUMLAH	1.971	3.001	4.097	2.541	2.504

Sumber: Dinas DPMPTSP, 2021

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa ada penurunan penerbitan izin pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya penerbitan izin yang sudah dilakukan secara online dengan sistem OSS. Sehubungan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektoronik atau Online Single Submission (OSS) maka penerbitan Izin harus dengan Sistem OSS. Dengan adanya sistem perizinan yang dilakukan secara online dengan sistem aplikasi perizinan secara OSS maka setiap pelaku usaha sudah dapat mencetak sendiri izinnya melalui aplikasi OSS dengan memenuhi setiap persyaratan atau komiten yang sudah ditentukan melalui sistem OSS.

Kinerja DPM-PPTSP Kabupaten Simalungun dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan sudah terlaksana secara optimal. Hal ini

menunjukkan indikasi bahwa kinerja pelayanan Perizinan pada DPM-PPTSP Kabupaten Simalungun semakin baik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian proses dokumen Perizinan merupakan upaya DPM-PPTSP Kabupaten Simalungun untuk memberikan hak kepastian hukum pada masyarakat dan pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun, terdapat 66 (enam puluh enam) jenis izin yang boleh diterbitkan.

7. **Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dan Kependudukan serta Meningkatnya Tertib Administrasi Dokumen Kependudukan.**

   Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dan Kependudukan serta Meningkatnya Tertib Administrasi Dokumen Kependudukan merupakan bagian dari pencapaian Misi 5. Pengukuran kinerja kepemilikan dokumen pencatatan sipil didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan dibagi jumlah penduduk yang seharusnya memiliki dokumen pendudukan, sedangkan untuk indikator meningkatnya tertib administrasi dokumen kependudukan pengukuran kinerjanya adalah persentase jumlah wajib KTP yang telah memiliki E-KPT atau telah melakukan perekaman E-KTP. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2018 tentang Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disebutkan salah satu yang diamanatkan Undang-undang tersebut adalah Stelsel

Aktif (Jemput Bola). Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun telah melakukan pelayanan jemput bola ke Kecamatan se Kabupaten Simalungun untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini selalu dilakukan setiap tahun sebagai implementasi dari UU Nomor 24 Tahun 2013. Dengan adanya pelayanan ini, masyarakat sangat terbantu dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Gambar : Pelayanan DISDUKCAPIL Ke Masyarakat di Kecamatan .

Adapun kegiatan penataan administrasi kependudukan Tahun 2020 dengan realisasi kegiatan :

1) Pelayanan dokumen kependudukan berupa pelayanan lapangan dilaksanakan di 32 kecamatan.
2) Penerbitan dokumen kependudukan (KTP-El).
3) Mewujudkan ketersediaan Laporan Informasi Kependudukan ;
4) Mewujudkan ketersediaan Database Kependudukan
5) Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yaitu keikutsertaan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional dan fasilitasi mengikuti kegiatan Bimtek Administrasi Kependudukan.

Tabel 3.31
Capaian Kinerja dan perbandingan capaian kinerja dengan berapa tahun terakhir di Dinas DUK dan CAPIL

No	Jenis Dokumen	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Kartu keluarga	64.528	57.976	59.128
2	KTP	104.806	48.374	52.423
3	Akte Kelahiran	34.850	53.795	21.569
4	Akte Perkawinan	3.125	7.514	3.072
5	Akte Perceraian	32	14	27
6	Akte Kematian	4.234	3.340	1.950

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Walaupun kinerja urusan pelayanan dokumen kependudukan telah dilakukan secara optimal, masih terdapatan kendala dan permasalahan bidang pelayanan yang tentu memerlukan perbaikan untuk dapat meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang antara lain:

1) Belum optimalnya pelayanan kependudukan yang dilihat dari sarana dan prasarana pendukung administrasi kependudukan yang masih terbatas.
2) Petugas registrasi kependudukan belum melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kurang maksimal
3) Sistem administrasi kependudukan yang sering mengalami perubahan.
4) Belum optimalnya upaya perbaikan sistem dan database kependudukan.
5) Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih rendah.
6) Luas wilayah Kabupaten Simalungun yang sangat luas menyebabkan masyarakat yang berada di kecamatan harus menempuk jarak tempuh yang jauh untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pamatang Raya.

Kebijakan yang dilaksanakan untuk menyikapi permasalah

pelayanan dibidang pencatatan sipil dan kependudukan adalah:

1) Petugas Registrasi Kepandudukan agar melaksanakan fungsinya dengan baik demi terwujudnya pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat Kabupaten Simalungun.
2) Perlunya pemeliharaan dan perbaikan terhadap sistem database kependudukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal.
3) Perlunya pemberian pembekalan kepada aparatur/petugas yang menangani administrasi kependudukan sehingga dapat menguasai sistem administrasi kependudukan dengan baik demi tercapaianya pelayanan yang maksimal.
4) Perlunya pengadaan untuk mobil pelayanan keliling yang dapat menjangkau masyarakat di kecamatan sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil.

8. Persentase Wilayah Tanggap Darurat dan Pasca Bencana yang Ditanggulangi.

Indikator kinerja sasaran Persentase Wilayah Tanggap Darurat dan Pasca Bencana yang ditanggulangi merupakan bagian dari pencapaian Misi 5 dimana pada Tahun 2020 ditargetkan 90% dan terealisasi 42% atau dengan capaian kinerja 46,67%. Untuk tahun 2020 terjadi penurunan angka capaian kinerja dari yang telah di targetkan dibandikan dengan tahun 2019 dimana capaian kinerja mencapai 76,75 %.

Di wilayah kabupaten simalungun menurut Kepala Badan BPBD Kab. Simalungun untuk tahun ini Kab. Simalungun dikategorikan rawan Bencana Alam, Bencana Alam tersebut terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan rawan banjir dan 8 (delapan) Kecamatan rawan longsor, Wilayah rawan banjir ada di Kecamatan Bandar, Pematang Bandar, Gunung Malela, Tanah Jawa, Dolok Batu Nanggar, Panei, dan

Kecamatan Siantar. Sedangkan wilayah rawan longsor di Kecamatan Raya, Sidamanik, Pamatang Sidamanik, Girsang Sipangan Bolon, Dolok Silou, Silou Kahean, Jorlang Hataran, dan Dolok Panribuan

Dari Tabel diatas dapat diketahui bencana yang sering terjadi di Kabupaten Simalungun selain bencana longsor tahun 2020, juga bencana lain yang perlu mendapat perhatian. Mengantisipasi hal tersebut, pembangunan bidang penanganan bencana diarahkan pada :

1. Pencegahan (Prevention)
2. Mitigasi (mitigation)
3. Kesiapan (preparenees)
4. Peringatan Dini (early warning)
5. Tanggap Darurat (response)
6. Bantuan Darurat (relief)
7. Pemulihan (recovery)
8. Rehabilitasi (rehabilitation)
9. Rekontruksi (recontruction)

Permasalahan dan kendala yang mempengaruhi terhadap kinerja penanggulangan bencana antara lain:

1. Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti misalnya jumlah truk pemadam kebakaran hanya 3 unit di Kabupaten Simalungun, sementara ada 32 Kecamatan yang harus dilayani
2. Terbatasnya anggaran baik dari BPBD maupun SKPD vertikal, sehingga BPBD kurang optimal dalam melaksanakan penanggulangan bencana.
3. Terbatasnya sumber daya manusia khususnya yang mempunyai Keahlian kebencanaan.
4. Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.

Kebijakan yang dilakukan untuk menyikapi permasalahan dan kendala terkait dengan kinerja pencegahan dan penanggulangan bencana adalah:

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia
2. Mengoptimalkan tata cara pencegahan untuk mengurangi dampak bencana
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang tersedia.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

SASARAN-15 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pencapaian Misi 5 yang mempunyai 1 (satu) indikator yaitu Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah dimana pada tahun 2020 target pertumbuhan sebesar 100% dan terealisasi 87,22% dengan capaian sebesar 87,22.

Tabel: 3.32
Perbandingan Capaian Kinerja meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019					
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	%	5%	9,63%	192,6%	100	87,22	87,22

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2021

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebesar Rp 86.345.342.512 sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp. 85.406.056.445. Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah merupakan yang bersumber dari hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Permasalahan yang dihadapi yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendapatan daerah yaitu:

a. Belum adanya pelatihan formal dan diklat tentang pajak.
b. Belum tersosialisasinya peraturan daerah tentang pajak daerah di setiap UPTD.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut kebijakan yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan pelatihan dan diklat tentang pajak bagi ASN di Badan Pendapatan Daerah.
b. Pengadaan sosialisasi tentang pajak daerah sampai ke tingkat masyarakat.

SASARAN-16 : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berkembangnya Usaha Koperasi/Industri Kecil Menengah

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berkembangnya Usaha Koperasi/ Industri Kecil Menengah merupakan bagian dari pencapaian Misi 5 yang mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Persentase Koperasi Yang Aktif dan Persentase Pelaku IKM yang Mendapatkan Pelatihan dan Bantuan Peralatan dengan rata-rata capaian kinerja 46,63%.

Tabel: 3.33
Capaian Kinerja Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berkembangnya Usaha Koperasi/Industri Kecil dan Menengah dan perbandingan kinerja dengan tahun lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019			Capaian 2020		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Koperasi Yang Aktif	%	66,8	61,87	92,5	100	66	66
2	Persentase Pelaku IKM yang Mendapatkan Pelatihan dan Bantuan Peralatan	%	40	40	100	100	27,27	27,27

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021, dan Disperindag tahun 2021

1. Persentase Koperasi Yang Aktif

Pengukuran kinerja indikator Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berkembangnya Usaha Koperasi didasarkan pada jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Simalungun yang aktif dalam arti memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Dinas Koperasi Kabupaten Simalungun seperti manajemen koperasi, pelaksanaan RAT setiap tahun, pengelolaan keuangan, pengelolaan unit usaha

koperasi serta yang berkaitan dengan keanggotaan koperasi. Kegiatan yang dilaksanakan untuk percepatan pengembangan kesempatan kerja dan pengembangan perkoperasian dilaksanakan beberapa kebijakan yaitu:

1) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM berupa kegiatan sosialisasi dan fasilitasi tata cara pembuatan kemasan produk UKM agar lebih menarik dan bervariasi dan mampu bersaing yang dilaksanakan di sekolah- sekolah serta penilaian kesehatan simpan pinjam koperasi untuk memastikan pengelolaan keuangan yang sehat secara finansial.
2) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah berupa kegiatan pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah se-Kabupaten Simalungun yang menghasilkan data yang terapdate.
3) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan kegiatan sosialisasi penatalaksanaan kelembagaan bagi pengurus dan pengelola koperasi untuk meningkatkan pengetahuan SDM pengurus dan pengelola koperasi baik dalam hal kelembagaan dan pelaksanaan adminstrasi keuangan.

Data perkembangan Koperasi Aktif dan Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah sampai Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel : 3.34
Perkembangan Koperasi Aktif sampai Tahun 2020

Bidang Usaha	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Koperasi Aktif	%	70%	61,12	61,42	61,87	66
Usaha Mikro dan Kecil Menengah	%	99%	99,67	99,67	100	90

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021.

Menurunnya jumlah perkembangan UMKM pada tahun 2020 disebabkan menurunnya daya saing dan daya beli masyarakat di

bidang industri kecil, hal ini tidak terlepas dari munculnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian kecil roda perekonomian UMKM mengalami sedikit guncangan.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKN adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya ketersediaan modal bagi pelaku UMKM.
2. Pelaku UMKM terlalu fokus pada produksi tanpa memperhatikan pemasaran.
3. Kurangnya pengetahuan tentang teknologi dan kemasaan produk.
4. Manajemen keuangan koperasi sering dijadikan ajang bisnis bagi pengurus koperasi.
5. Munculnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan arus perputaran modal tidak stabil

Strategi yang dilaksanakan untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah:

a. Membantu/memfasilitasi pelaku UMKM membuka jaringan kemitraan dan jaringan usaha dengan beberapa bank yang dapat memberikan fasilitasi permodalan.
b. Mengikutsertakan pelaku UKM dalam berbagai kegiatan bazar ataupun pameran.
c. Memberikan pelatihan dalam upaya menjadikan SDM pelaku UMKM agar mampu mengelola usaha dengan baik dengan memperbaiki kemasan produk.
d. Sebaiknya pengelola koperasi dikenakan sanksi apabila koperasi dijadikan ajang bisnis.

2. Persentase Pelaku IKM yang Mendapatkan Pelatihan dan Bantuan Peralatan

Untuk pengukuran kinerja bidang pengembangan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) didasarkan pada jumlah pelaku

IKM yang mendapatkan bantuan berupa pelatihan dan bantuan peralatan. Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan baik dalam bentuk pelatihan maupun bantuan peralatan sampai dengan tahun 2020 pelaku IKM yang ada di Kabupaten Simalungun mendapatkan pelatihan dan bantuan masih relatif rendah yaitu sebesar 27,27%.

Pada kegiatan ini telah dilaksanakan pelatihan bertenun dan bantuan mesin tenun kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Jorlang Hataran dan Kecamatan Siantar dengan total peserta pelatihan sebanyak 20 orang. Untuk Indikator Kinerja jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan/pelatihan di bidang industri yaitu total yang mendapat pembinaan/pelatihan sebanyak 40 orang + 20 orang = 60 orang dibagi dengan target pada penetapan kinerja sebanyak 220 orang sehingga didapat persentase sebesar 27,27 %. Terjadinya penurunan persentase ini dibandingkan dengan capaian tahun 2019, dikarenakan adanya perubahan penggunaan anggaran yang ada di Pemerintah Kabupaten Simalungun. Adanya pandemi COVID-19 di awal semester kedua tahun 2020 merubah sasaran penggunaan anggaran baik di tingkat Perangkat Daerah maupun di Pemerintah Kabuaten.

Adapun permasalahan dan kendala pencapaian target kinerja pengembangan IKM adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan pelatihan disertai dengan bantuan peralatan membutuhkan alokasi dana besar sehingga banyak usulan dan kebutuhan pelaku IKM belum dapat dipenuhi.
2) Kurangnya ketersediaan modal bagi pelaku UMKM/IKM.
3) Pelaku UMKM terlalu fokus pada produksi tanpa memperhatikan pemasaran.
4) Kurangnya pengetahuan tentang teknologi dan kemasaan produk.
5) Manajemen keuangan koperasi sering dijadikan ajang bisnis bagi pengurus koperasi.
6) Munculnya pandemi Covid-19 menyebabkan arah kebijakan

penggunaan anggaran juga lebih difokuskan pada penanganan Covid-19.

Sedangkan kebijakan yang dilaksanakan untuk menyikapi beberapa permasalahan pengembangan IKM antara lain:

a. Pengusulan anggaran kegiatan melalui dana Provinsi dan Pusat (DAK).
b. Membantu/memfasilitasi pelaku UMKM membuka jaringan kemitraan dan jaringan usaha dengan beberapa bank yang dapat memberikan fasilitasi permodalan.
c. Mengikutsertakan pelaku UKM dalam berbagai kegiatan bazar ataupun pameran.
d. Memberikan pelatihan dalam upaya menjadikan SDM pelaku UMKM agar mampu mengelola usaha dengan baik dengan memperbaiki kemasan produk.
e. Sebaiknya pengelola koperasi dikenakan sanksi apabila koperasi dijadikan ajang bisnis.

SASARAN-17 : Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Indikator kinerja sasaran Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merupakan bagian dari pencapaian Misi 5 yang mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup dan Persentase Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dengan rata-rata capaian kinerja 85,65%.

Tabel : 3. 35
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dari Sasaran 17

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019			Capaian 2020		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	70	70	100	98	98

2	Persentase Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	%	8	8	100	30	22	73,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama mengalami pencapaian Kinerja yang sangat signifikan, yang dimana target dan realisasi rata-rata diatas 50 % yang dimana target pencapaian untuk tahun 2020 mencapai 152 dokumen yang terdiri dari 40 Dokumen UKL/UPL dan Amdal serta 112 Dokumen SPPL. Dalam hal pencapaian Jumlah Usaha/ Kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL/UPL dan Amdal sebanyak 39 Dokumen dan SPPL mencapai 112 dokumen (98,68%). Jika dibandingan dengan tahun 2019 jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup mengalami kenaikan dari capaian untuk tahun 2019 sebesar 70% menjadi 98% dari target yang telah ditetapkan.

Pada indikator kedua dari sasaran 17 (tujuh belas), Jumlah Penanganan kasus-kasus lingkungan hidup mengalami peningkatan dari tahun 2019, dimana untuk tahun 2019 dari target 8 (delapan) kasus terselesiakan 8 (delapan) kasus. Sedangakan untuk tahun 2020 jumlah kasus naik menjadi 30 kasus lingkungan yang harus diselesaikan. Hal ini sesuai dari terget yang telah ditetapkan dengan penyelesaian kasus mencapai 22 kasus, dengan capaian kinerja mencapai 73,33%. Kasus kasus yang telah berhasil ditangani tidak terlepas dari saling mendukung dan koordinasi tugas tugas dalam daerah dan luar daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan terdapat beberapa

permasalahan dan hambatan yaitu:

a. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolahan persampahan di Kabupaten Simalungun.
b. Belum terlaksanannya laboratorium di DLH Simalungun dengan peralatan yang kurang memadai.

Kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolahan persampahan.
2. Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun

SASARAN-18 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian dari pencapaian Misi 5 yang mempunyai 1 (satu) indikator yaitu Persentase penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak dengan capaian kinerja 61,53%.

Tabel : 3.36
Capaian Kinerja Sasaran 18 tahun 2020 dan perbandingan Kinerja dengan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019			Capaian 2020		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan yang ditangani	%	80	49.23%	61,53%	100%	95 %	95 %

Dinas DPPA Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja dari indikator 1 (satu) dari sasaran 18 yaitu : **“ Meningkatnya Pencegahan dan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak “**berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran

sebesar 95 %. Dari capaian tersbut dapat dirincikan seperti; Indikator kinerja jumlah pendampingan kasus KDRT Perempuan target 10 kasus dengan realiasasi hanya 3 kasus dengan capaian 30%. Untuk jumlah pendampingan kasus anak target yang telah ditetapkan adalah 10 kasus dengan realisasi 16 kasus berarti dengan capaian 160%, hal ini terjadi karena banyaknya laporan yang harus diselesaikan lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan. Mengingat semakin besarnya kasus kekerasan terhdap perempuan dan anak di Indonesia,Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun selalu melakukan pendampingan kasus dengan optimal.

Masalah Kekerasan Perempuan dan Anak diharapkan dapat tertangani serta tercipta rasa aman bagi perempuan dalam pemenuhan hak asasinya, sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berkeadilan dan demokratis. Kita harus memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, karena mereka mempunyai hak yang sama untuk “mendapatkan perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas

Program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2020 difokuskan menyikapi isu yang berkembang ditengah-tengah masyarakat antara lain eksploitasi anak, bahaya penyakit HIV/AIDS/ serta bahaya narkoba termasuk penguatan kelembagaan yaitu penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak melalui pelaksanaan kegiatan Forum Anak dalam bentuk pelatihan dengan tujuan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.

Permasalahan yang dihadapi dibidang perberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

a. Masih minimnya kinerja pendataan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan karena luasnya wilayah kerja dan kurangnya keterbukaan masyarakat.
b. Masih kurangnya pengetahuan ibu tentang hak-hak perempuan.

Sedangkan solusi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja kedepan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi kepada instansi terkait.
b. Pembentukan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu dan Pembentukan Pemberdayaan Perempuan dan Anak).
c. Kegiatan Sosialisasi yang berkaitan dengan kesejahteraan rumah tangga.

SASARAN-19 : Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori/Desa

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori/Desa merupakan bagian dari pencapaian Misi 5 yang mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Jumlah Pembinaan ke nagori dalam Pengelolaan ADD dan DD serta jumlah PKK yang aktif di Nagori untuk memberdayakan 10 Program Pokok PKK dengan rata-rata capaian kinerja 100%.

Tabel 3.37
Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori/Desa.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019			Capaian 2020		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Pembinaan ke nagori dalam pengelolan ADD dan DD	Nagori	386	386	100	386	386	100
2	Jumlah PKK yang aktif di nagori untuk memberdayakan 10 program PKK	Nagori	386	386	100	386	386	100

Sumber: Dinas DPMPN Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian di 2 (dua) indikator dari sasaran 19 (sembilan belas) bahwa capaian kinerja masing-masing adalah 100%. Untuk indikator pertama dapat dicapai dengan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa melalui Pendampingan khususnya Sekdes dan Bendahara Desa dalam menyusun APB NAgori 2020.

Diharapkan kondisi ini bisa lebih ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang sehingga Dana Desa bisa semakin dirasakan kebermanfaatannya dengan tepat sasaran dan dengan pengelolaan yang baik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sasaran tersebut diatas bisa dicapai dengan senantiasa menerapkan kegiatan di bawah ini:

1. Penyusunan Ihtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Nagori
2. Penyusunan Sistem dan Prosedur (Sisdur)Pengelolaan keuangan Nagori
3. Asistensi dan monev penyusunan APB Nagori
4. Penyusunan pedoman pelaksanaan APB Nagori
5. Peningkatan dan pengembangan Siskeudes

Untuk indikator kedua, Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Anggota Tim Penggerak PKK adalah para relawan, yang tidak menerima gaji, yang menyediakan sebagian dari waktunya untuk PKK. Walaupun Sasaran PKK adalah keluarga, khususnya ibu rumahtangga perempuan, sebagai sosok sentral dalam keluarga. Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana,

pengendali dan penggerak. Pembinaan tehnis kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur dinas instansi pemerintah terkait. Sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan Program peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK dengan kegiatannya Operasional pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan pendukung capaian kinerja pemberdayaan dan nagori/desa untuk tahun 2020 telah terealisasi kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan yaitu pembentukan Badan Usaha Milik Nagori, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa berupa kegiatan Pembinaan Nagori/Kelurahan penyuluhan sepuluh program pokok PKK serta peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan kegiatan fasilitasi pengelolaan kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Permasalahan dan kendala dalam pemberdayaan pemerintahan desa/nagori dan pemberdayaan masyarakat desa adalah masih kurangnya kapabilitas perangkat nagori dalam pengelolaan keuangan nagori sedangkan kebijakan yang dilakukan untuk menyikapi permasalahan tersebut melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan perangkat nagori dalam pengelolaan keuangan.

SASARAN-20 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah merupakan bagian dari pencapaian Misi 5 yang mempunyai 1 (satu) indikator yaitu Skore Pola Pangan Harapan (PPH) dengan capaian kinerja 94%.

Tabel : 3.38
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019			Capaian 2020		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Skor Pola Pangan harapan (PPH)	%	95	89,3	94	94,70	83,77	88,4

Sumber: Dinas Hanpang, 2020

Untuk mendukung kinerja Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Simalungun dilaksanakan kegiatan antara lain penanganan daerah rawan pangan, pelaksanaan Posko Ketahanan Pangan, Pembinaan Nagori Percontohan PKK, Pembinaan Kelompok Tani, Pemanfaatan dan Analisa harga Pangan Pokok dan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Penangan daerah rawan pangan dilakukan dengan pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang.
- Posko Ketahanan Pangan dilakukan dengan melakukan pertemuan yang membicarakan tentang informasi yang terkait dengan ketahanan pangan.
- Pembinaan Nagori Percontohan HATINYA PKK dilakukan kepada nagori yang diperlombakan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Simalungun setiap tahunnya dan dilakukan pembinaan dari OPD.
- Pembinaan Kelompok Tani dilakukan dengan memberikan bantuan ternak ayam sekaligus pembinaan, sedangkan pengembangan Desa Mandiri Pangan dilakukan kepada kelompok tani dengan memberikan bantuan bibit jahe.

Adapun permasalahan dan solusi kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya SDM kelompok tani.
2) Terbatasnya anggaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk menyikapi permasahan tersebut kebijakan yang dulakukan antara laini:

1) Pembinaan SDM Kelompok Tani.
2) Usulan penambahan anggaran.

SASARAN-21 : Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan Daerah Bidang Pertanian.

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Umggulan Daerah merupakan bagian dari pencapaian Misi 5 yang mempunyai 7 (tujuh) indikator yaitu Jumlah Produksi Komoditi Padi, Jagung, Ubi Kayu, Cabe, Sawit, Karet dan kopi dengan rata-rata capaian kinerja 99,64%, hal ini menurun dibandingkan dengan rata-rata capaian pada tahun sebelumnya yang mencapai 113,77%.

Tabel : 3.39
Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan Daerah bidang Pertanian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019			Capaian 2020		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Produksi Komoditi Padi	Ton	482.120	430.757,22	89,34	366.887	377.526	102.89
2	Jumlah Produksi Komoditi Jagung	Ton	168.172,9	233.681,80	138,95	234.977	256.944	109,34
3	Jumlah Produksi Komoditi Ubi Kayu	Ton	137.327	209.319,30	152,42	213.319	155.456	72,87
4	Jumlah Produksi Komoditi Cabe	Ton	332.020	52.512	163.99	35.232	49.356	140,08
5	Jumlah Produksi Komoditi Sawit	Ton	563.500	555.551	98,58	548.400	559.909,9	102,09
6	Jumlah Produksi Komoditi Karet	Ton	2.750	2.506,09	91,13	2.500	2.288,02	91,52
7	Kopi	Ton	7.100	4.403,24	62,01	4.400	3.463,46	78,71

Sumber: Dinas Pertanian, 2020

- **Jumlah Produksi Komoditi Padi**

  Kabupaten Simalungun merupakan salah satu kabupaten lumbung padi terbesar di Sumatera Utara. Produksi padi Kabupaten Simalungun tahun 2020 adalah 377.526 Ton Data perkembangan luas panen dan produksi padi di Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.40
Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Simalungun 2016-2020

No	Komoditi	satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Padi Sawah** Panen (Ha)		102.437,50	71.911,4	77.887,2	62.598,6	51.303
	Produksi (Ton)		634.527,6	447.135	496.114	336.322	300.200
2	**Padi Ladang** Panen (Ha)		10.221,30	17.226,7	15.420,0	9.053,5	20.947
	Produksi (Ton)		35.013.5	58.860,1	54.511	30.555	77.525
3	**Padi (Sawah + Ladang)** Panen (Ha)		112.658.8	89.138	93.307,2	71.652,1	72.249
	Produksi (Ton)		669.540.9	505.995,7	550.625	366.877	377.726

Sumber: Dinas Pertanian, 2020

Foto: Penggunaan Lahan pertanian (Padi sawah dan Ladang)

Berdasarkan data produksi padi pada tahun 2020 makaKabupaten Simalungun dapat dikategorikan mengalami

swasembada beras yaitu sebesar 97.129,892 ton dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah penduduk Kabupaten Simalungun tahun 2019 adalah 859.228 jiwa (Sumber : Simalungun Dalam Angka Tahun 2019)
- Produksi padi padatahun 2020 sebesar 366.877,3 ton (dikonversike beras =377.526 x 0,6332 = 231.866ton)
- Kebutuhan beras adalah sebesar 156 kg per kapita
- Kebutuhan beras Kabupaten Simalungun Tahun (Jumlah penduduk x kebutuhan perkapita) adalah 863,693 x 156 kg = 134.736,108ton
- Swasembada beras (Jumlah produksi beras - total kebutuhan) 231.866 ton - 134.736,108 ton97.129,892 ton

➢ Komoditi unggulan lainya seperti jagung, ubi kayu, cabe dan tanaman perkebunan rakyat adalah seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.41
Perkembangan Produksi Jagung,Ubi Kayu, Cabe dan Komoditi Perkebunan Kabupaten Simalungun 2016-2020

Komoditi	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Jagung						
Panen (Ha)		63.342.9	58.384,1	29.992,1	41.676,8	45.720
Produksi (Ton)		423.863.9	339.911,2	168.158	234.977	256.944
Ubi Kayu						
Panen (Ha)		8.625.2	8.444	4.227,8	6.416,9	4.675
Produksi (Ton)		296.475	283.655	137.910	213.319	155.456
Cabe						
Panen (Ha)		2.357	2.713	3.256	3.242	4.773
Produksi (Ton)		41.841	49.030	60.732	52.512	73.584
Sawit						
Panen (Ha)		29.142,90	30.041,83	25.737,07	27.581.8	27.755,50
Produksi (Ton)		553.585,93	547.209,03	517.997,23	555.551	559.909,88
Karet						
Panen (Ha)		14.404,81	13.445,98	2.826,62	2.628,32	2.517,99
Produksi (Ton)		12.402,77	12.142,58	2.678,94	2.506,09	2.288,02
Kopi						
Panen (Ha)		7.753,32	7.843,42	6.962,51	8.688,23	7.880,84

Produksi (Ton)		9.720,31	9.743,5	5.886,10	4.403,24	4.049,07

Sumber : Dinas Pertanian, 2020.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan khususnya yang terkait dengan kinerja tanaman pangan walaupun secara umum dapat mencapai target namun masih banyak yang memerlukan perbaikan untuk mengoptimalkan produksi. Beberapa kendala dan permasalahan yaitu:

1) Bantuan Obat- obatan yang diberikan untuk Komoditi Tanaman Pangan belum sepenuhnya terpenuhi sesuai alokasi permintaan petani dikarenakan menjaga stok gudang apabila terjadi serangan OPT di lapangan yang mendadak.
2) Pada peningkatan Kemampuan Lembaga Petani terdapat beberapa permasalahan di antaranya:
   a. Kelompok tani melakukan pertanaman tidak sesuai jadwal karena masih mengharapkan bantuan dari pemerintah
   b. Masih banyak lahan sawah dikelilingi areal perkebunan (sawit) sehingga kurang efektif dalam pengendalian hama tikus.
   c. Kurangnya kesadaran petani dalam mengendalikan serangan hama tikus
   d. Kurangnya koordinasi aparatur nagori untuk menggerakkan petani/kelompok tani dalam mensukseskan program pemerintah.
3) Dibutuhkan pembinaan lebih lanjut untuk pembinaan penguatan kelembagaan sehingga terbentuknya organisasi yang solid dan kompak
4) Penyusunan programa penyuluhan pertanian memiliki beberapa permasalahan di antaranya:
   a. Kurangnya fasilitas dan operasional penyuluh PNS THLTB PP untuk menyusun programa penyuluhan nagori kecamatan.
   b. Kurangnya kerjasama antara petani dalam penyusunan program penyuluhan.

c. Pengurangan anggaran/dana bagi tenaga/petugas BP3K kecamatan.

5) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi Balai Benih Hortikultura Purba, permasalahannya yaitu:

a. Tenaga kerja tida tersedia dengan jumlah yang banyak sehingga pertanaman jagung komposit tida dapat dilaksanakan dalam satu kerja.

b. Pada saat tanaman jagung berumur 35 hari setelah tanam sampai saat berbunga terjadi musim kemarau panjang tanaman jagung yang mengakibatkan pertumbuhan yang kurang baik.

c. Penyiangan tanaman dan panen tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat karena keterbatasan tenaga kerja.

d. Pemasaran hasil benih jagung komposit kurang diminati petani.

Kebijakan yang dilakukan untuk menyikapi kendala dan permasalahan adalah sebagai berikut:

1) Permohonan hendaknya dibuat sebelum areal terserang meluas di lapangan sehingga bantuan yang dimohonkan mampu mencakup seluruh wilayah.

2) Agar bantuan benih dari pemerintah direalisasikan sesuai jadwal tanam petani, sehingga P2T3 di lapangan dapat berjalan sesuai jadwal, diharapkan Pemerintah Pusat membuat kebijakan untuk menjamin harga saat panen raya, diharapkan Kepala UPTD beserta PPL dan PHP agar mensosialisasikan kepada kelompok tani tentang program pemerintah.

3) Untuk dapat diakomodir pembinaan lanjutan baik dalam pelatihan manajemen keorganisasian dan melakukan pembelajaran tingkat lapangan.

4) Tetap menampung Anggaran APBD tahun 2020 dalam penyusunan programa penyuluhan dan menampung Anggaran

pada APBD 2019 petugas/tenaga BP3K dalam dukungan pelaksanaan program penyuluhan pertanian dan pembangunan pertanian di kecamatan.

5) Solusi untuk pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi Balai Benih Hortikultura Purba, di antaranya:
   a. Pertanaman jagung komposit dilakukan secara berkelanjutan sampai selesai.
   b. Pertanaman jagung komposit disesuaikan dengan cuaca atau iklim pada lokasi penangkaran.
   c. Perlu adanya alat tanam jagung dan alat untuk meniang yang lebih modern.
   d. Melakukan sosialisasi ke nagori agar petani mau menanam benih jagung komposit yang sudah ada label.

SASARAN-22 : Meningkatnya Kunjungan Wisata

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata merupakan bagian dari pencapaian Misi 5 yang mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara dengan rata-rata capaian kinerja 91,84%.

Tabel :3.42
Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan Pariwisata

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019			Capaian 2020		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara	Orang	20.000	17.383	86%	20.000	119	0,005%
2	Jumlah Kunjungan Wisataan Nusantara	Orang	560.000	542.003	96%	500.000	371.159	74%

Sumber: Dinas Pariwisata, 2020

Pengukuran kinerja meningkatnya kinerja sektor unggulan pariwisata dilihat dari data pencapaian target kunjungan wisata selama 1 tahun. Adapun tingkat kunjungan wisata setiap tahunya masih berfluktuasi, pada tahun 2020 terjadi penurunan kinjungan

wisata baik manca Negara maupun nusantara. Hal ini disebabkan muncul Pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat takut untuk berinteraksi diluar kawasan tempat tinggal, selain itu pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk tetap tinggal dirumah dengan melakukan Pembatasan Sosial.

Adapun destinasi pariwisata di Kabupaten Simalungun antara lain Wiasata Alam yang terdiri dari Danau Toba, Batu Gantung, Air Terjun Halimbingan, Huta Sibatu Lotting, Sibaganding, Sipangan Bolon, Batu Lubang,Dolok Sae-sae, Liang Manjontik, Liang Bolon serta wisata alam Mual Bolon. Wisata Budaya terdiri dari Rumah Bolon, Museum Simalungun serta makam raja-raja simalungun.

Gambar: Kawasan Pariwisata Danau Toba Kabupaten Simalungun

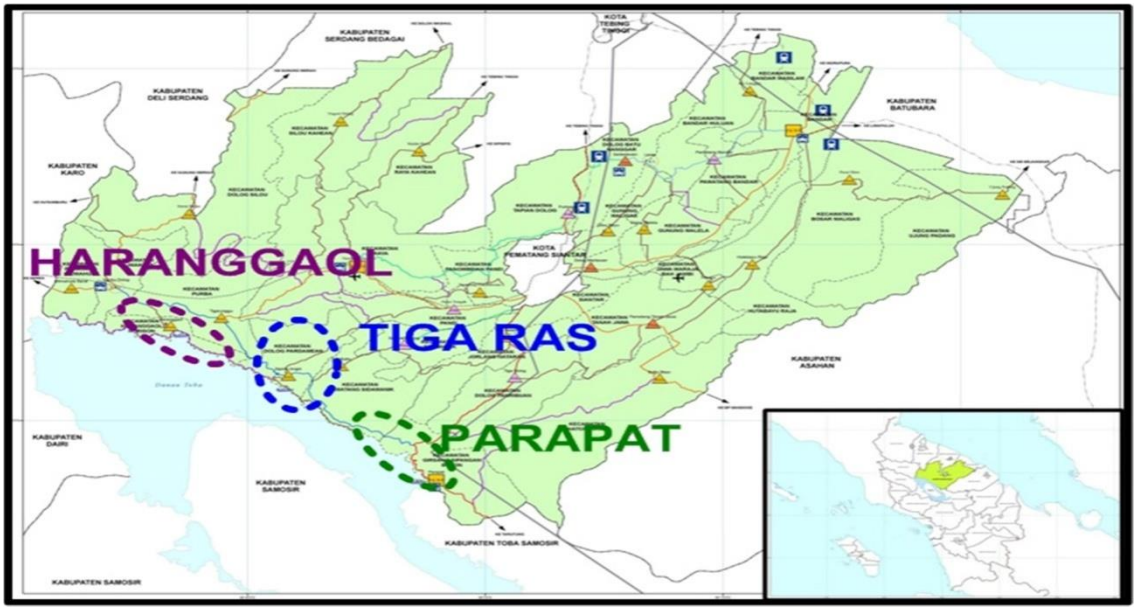

Dalam rangka mendukung pengembangan potensi pariwisata telah dilakukan kegiatan/even baik yang sifatnya promosi dan pemberdayaan pelaku wisata maupun melalui pelaksanaan even wisata secara rutin dan berkesinambungan yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah yang diikuti oleh perwakilan kontingen 32 (tiga puluh dua) Kecamatan yang mengikuti berbagai macam kegiatan kesenian dan perlombaan olahraga tradisional

2. Pelaksanaan kegiatan Pagelaran Multi Etnis yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Simalungun mengakomodir upaya – upaya pelestarian kesenian dan kebudayaan dari beberapa etnis yang ada di Kabupaten Simalungun.
3. Pelaksanaan Pengkajian Situs Cagar Budaya Simalungun yang bertujuan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai peninggalan – peninggalan cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Simalungun sehingga dapat kita upayakan untuk diinventarisir sebagai salah satu potensi kekayaan budaya di Kabupaten Simalungun.
4. Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan kegiatan pameran Gebyar Wisata Nusantara (GWN) di Jakarta Convention Center yang merupakan salah satu kegiatan promosi pariwisata skala nasional.
5. Melaksanakan beberapa event/ kegiatan di lokasi destinasi pariwisata terutama di Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon sepert; Hiburan hari – hari besar keagamaan (Imlek dan Idul Fitri)
6. Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun dalam pelaksanaan kegiatan Festival Danau Toba yang penyelenggaraannya di Tahun 2020 di Open Stage-Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
7. Pelaksanakan kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang dilaksanakan di 5 (lima) lokasi yaitu :

   a. Penataan di lokasi objek wisata sipolha (pembuatan gapura/

gerbang masuk).

b. Penataan di lokasi objek wisata Tigaras (pembuatan shelter)
c. Penataan tangga jalan setapak di lokasi objek wisata Sampuran Tarak Ni Onggang
d. Penataan di lokasi objek wisata Kawah putih Tinggi Raja (pembangunan TIC dan kamar mandi)
e. Penataan di lokasi Makam Raja Raya (pembuatan jalan setapak tangga menuju paranggiran Raja)

8. Melakukan kegiatan pelatihan kepada para pelaku pariwisata dan masyarakat di lokasi objek wisata melalui beberapa kegiatan pelatihan yaitu : Pelatihan tata Kelola Destinasi pariwisata, Pelatihan Pemandu Wisata Alam, Pelatihan Pemandu Wisata Budaya, Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja, Pelatihan manajemen Homestay/ Pondok Wisata/ Rumah Wisata, dan Pelatihan Pengelolaan warisan Budaya. Semua kegiatan pelatihan dilaksanakan di Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

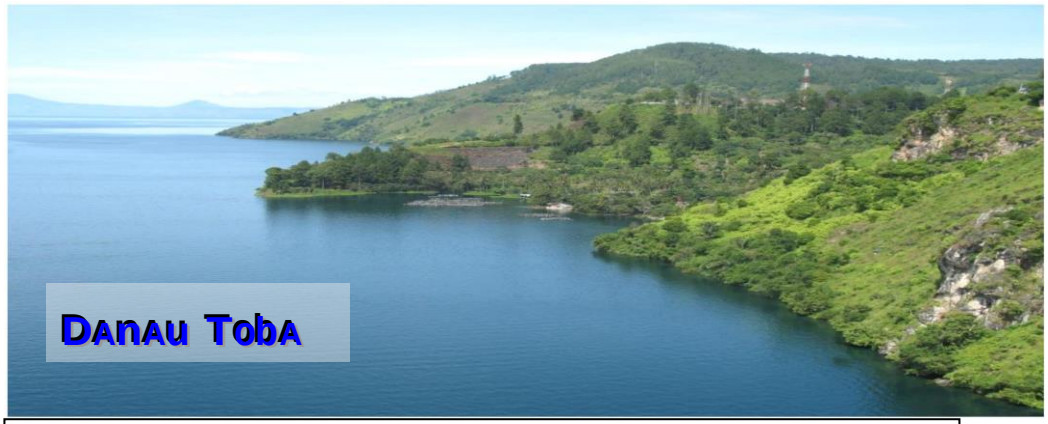

Foto: Objek Wisata Danau Toba, Sumber Dinas pariwisata

Tabel: 3.43
Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Bulan Tahun 2019 dan 2020
Di Kabupaten Simalungun

NO	OBJEK WISATA	2019		2020	
		NUSANTARA	MANCANEGARA	NUSANTARA	MANCANEGARA
1	Parapat	119.756	13.218	142.361	117
2	Bukit Indah Simarjarunjung (BIS)	194.965	3.679	119.100	-
3	Pantai Paris, Ardana, Grace, Bt. Hoda (Tigaras)	50.000	-	37.250	-
4	Rumah Bolon Purba	1.505	412	20	-
5	Bah Damanik (Sarimatondang)	43.000	2	15.117	-
6	Bah Biak (Sidamanik)	30.820	-	13.000	-
7	Pemandian Alam Sejuk (PAS)	39.966	-	14.200	-
8	Karang Anyer (Gunung Maligas)	20.769	-	13.110	-
9	Aek Nauli Elephant Conservation Camp (ANECC)	38.866	70	15.401	2
10	TWA Dolok Tinggi Raja	2.356	2	1.600	-
J U M L A H		**542.003**	**17.383**	**371.159**	**119**
		559.386		**371.278**	

Sumber: Dinas Pariwisata, 2020

Permasalahan dan solusi kegiatan dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1) Minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya potensial aparatur pariwisata
2) Kemampuan APBD Kabupaten Simalungun relatif terbatas untuk mengcover pengembangan di destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Simalungun
3) Sumber daya industri pariwisata belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan wisatawan

Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD terkait penataan dan pengembangan sarana dan prasarana objek – objek wisata yang potensial di Kabupaten Simalungun.

Pada Tahun 2020 Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun mendapatkan Program Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang tujuannya untuk membantu Pemerintah Daerah serta Industri Hotel dan Restoran yang sedang mengalami gangguan finansial

serta recovery penurunan PAD bagi Pemerintah Daerah akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan jangka waktu pelaksanaan yaitu bulan September – Desember 2020.

Berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata TA. 2020 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-244/MK.7/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Pemerintah Daerah kabupaten Simalungun mendapatkan bantuan Hibah Pariwisata sebesar Rp. 2.691.060.000,- (Dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah). Sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Usulan Rencana Kerja Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor : 41/BA-DHP/DIT.IMP/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 disepakati usulan kegiatan Hibah Pariwisata di Kabupaten Simalungun yaitu :

Untuk menyikapi permasalahan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan dan pengembangan potensi wisata di Kabupaten Simalungun dilakukan dengan kebijakan:

1) Terus meningkatkan koordinasi antar pelaku pariwisata, koordinasi lintas SKPD di Kabupaten Simalungun dan pemerintah atasan,
2) Menggunakan narasumber yang kompeten dalam kegiatan – kegiatan tertentu.
3) Mengintensifkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan sumber keuangan yang ada untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pariwisata dan budaya.

Pengusulan kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dari sumber dana APBD Kabupaten Simalungun, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN di tahun – tahun berikutnya.

Tabel : 4.44
Dana Hibah Kabuaten Simalungun Kepada Industri Pariwisata

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3		4
1	Penyaluran kepada Industri Pariwisata (Hotel dan Restoran)	1.883.742.000	592.187.026,29	**70%**
2	Pelaksanaan Kegiatan Pariwisata di Daerah :	766.952.100	620.175.000	**25%**
	- Sosialisasi dan Implementasi Program CHSE bagi Pegawai Hotel dan Restoran			
	- Sosialisasi dan Implementasi Program CHSE bagi Pelaku Usaha Pariwisata dan Masyarakat			
	- Bimbingan Teknis Program CHSE bagi Pegawai Hotel dan Restoran			
	- Bimbingan Teknis Program CHSE bagi Pelaku Usaha Pariwisata dan Masyarakat			
	- Dukungan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kebersihan, Keindahan dan Keamanan			
3	Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi sektor pariwisata :			
	- Workshop Pemulihan Ekonomi sektor pariwiata bagi pengusaha Hotel dan Restoran			
4	Biaya operasional pelaksanaan hibah pariwisata dan pengawasan APIP :	40.365.900,	32.586.800,00	5%
	- Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi			
	- Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan			
	- Pelaksanaan Review APIP			
	J U M L A H	2.691.060.000	1.244.948.826,29	100%

Sumber: Dinas Pariwisata, 2020

Untuk realisasi pelaksanaan kegiatan Hibah Pariwisata Tahun 2020 Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun hanya dapat melaksanakan Program Hibah Pariwisata Tahun 2020 ini pada Tahap I saja yaitu sebesar : Rp. 1.345.530.000,-

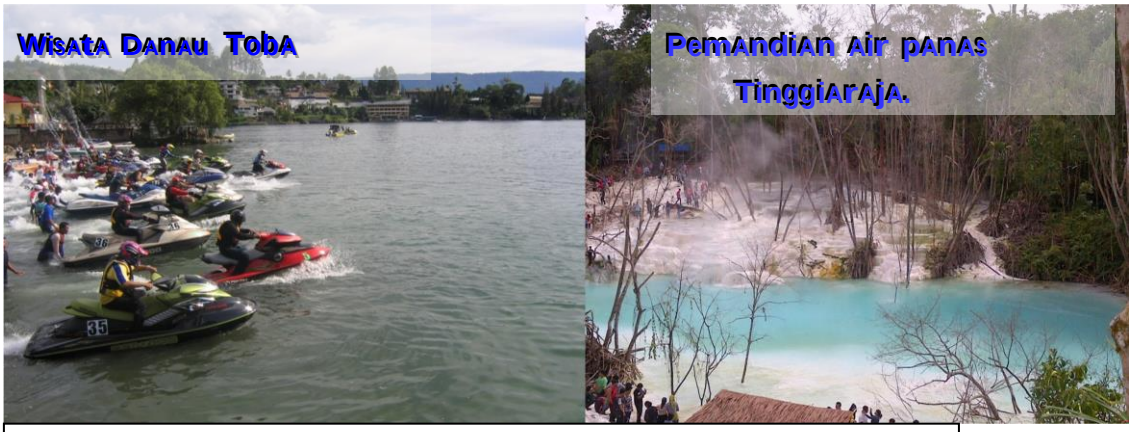

Foto: Objek Wisata Danau Toba, Sumber Dinas Pariwisata

B. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN.

1. Anggaran dan Belanja Kabupaten Simalungun Tahun 2020

Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Simalungun menargetkan anggaran pendapatan daerah Rp. 2.423.099.490.954,00, namun melalui Perbup No 52 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD, Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun menjadi Rp. 2.237.585.665.770,00 dan terealisasi Rp. 2.175.998.528.096,30 atau 97,25 %. Rincian pendapatan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 seperti terdapat pada tabel berikut :

URAIAN	ANGGARAN TA 2020		REALISASI TA 2020	%
	Perda No 4 Tahun 2019 tentang APBD	Perbup No 52 Tahun 2020 tetntang Perubahan APBD		
	Rp	Rp	Rp	
PENDAPATAN - LRA	**2.423.099.490.954,00**	**2.237.585.665.770,00**	**2.175.998.528.096,30**	97,25
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	**174.463.005.500,00**	**176.014.333.010,00**	**159.600.234.395,77**	**90,67**
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	99.000.000.000,00	99.000.000.000,00	86.048.797.693,00	86,92
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	4.276.385.000,00	4.276.385.000,00	2.398.477.260,00	56,09
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	19.088.536.500,00	18.460.332.075,00	14.573.946.375,00	78,95
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	52.098.084.000,00	54.277.615.935,00	56.579.013.067,77	104,24
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	**1.836.064.062.760,00**	**1.626.924.105.760,00**	**1.582.524.160.241,00**	**97,27**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	**1.741.109.246.000,00**	**1.531.969.289.000,00**	**1.509.802.918.030,00**	**98,55**
Bagi Hasil Pajak - LRA	47.321.713.000,00	42.767.575.000,00	31.405.551.924,00	73,43
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2.330.772.000,00	3.330.959.000,00	3.836.535.466,00	115,18
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.263.388.980.000,00	1.146.405.476.000,00	1.136.239.874.000,00	99,11
Dana Alokasi Khusus Fisik - LRA	156.971.274.000,00	82.967.202.000,00	81.874.175.509,00	98,68
Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA	271.096.507.000,00	256.498.077.000,00	256.446.781.131,00	99,98
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	**94.954.816.760,00**	**94.954.816.760,00**	**72.721.242.211,00**	76,59
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	94.954.816.760,00	94.954.816.760,00	72.721.242.211,00	76,59

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	**412.572.422.694,00**	**434.647.227.000,00**	**433.874.133.459,53**	99,82
Pendapatan Hibah - LRA	113.882.689.694,00	140.128.996.000,00	139.355.902.459,53	99,45
Pendapatan Lainnya - LRA	298.689.733.000,00	294.518.231.000,00	294.518.231.000,00	100,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Simalungun

Sedangkan untuk belanja daerah Tahun 2020 dengan jumlah anggaran belanja Rp.1.907.674.418.142,00 namun mengalami perubahan anggaran (*refocusing*) menjadi Rp. 1.802.505.389.192,00 dan terealisasi Rp.1.722.682.263.636,38. Rincian belanja daerah seperti terdapat pada tabel berikut :

Uraian	Tahun 2020			%
	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan (Refocusing)	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BELANJA	**1.907.674.418.142,00**	**1.802.505.389.192,00**	**1.722.682.263.636,38**	**95,57**
BELANJA OPERASI	**1.687.019.174.572,00**	**1.442.972.105.115,00**	**1.391.927.700.232,38**	**96,46**
Belanja Pegawai	1.072.810.161.393,00	921.281.483.950,00	903.064.528.566,78	98,02
Belanja Barang dan Jasa	397.596.568.441,00	305.122.604.016,00	258.818.678.382,70	84,82
Belanja Bunga	9.951.557.544,00	4.472.841.649,00	4.472.841.649,00	100,00
Belanja Hibah	201.660.887.194,00	211.957.175.500,00	225.433.651.633,90	106,36
Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00	100,00
BELANJA MODAL	**213.655.243.570,00**	**107.214.562.374,00**	**103.882.357.774,00**	**96,89**
Belanja Modal Tanah	239.477.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.658.123.570,00	25.083.663.524,00	23.883.225.309,00	95,21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.643.121.500,00	34.715.525.690,00	34.163.794.596,00	98,41
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	134.057.979.500,00	44.433.650.288,00	42.854.214.993,00	96,45
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.056.542.000,00	2.981.722.872,00	2.981.122.876,00	99,98
BELANJA TAK TERDUGA	**7.000.000.000,00**	**252.318.721.703,00**	**226.872.205.630,00**	**89,91**
Belanja Tak Terduga	7.000.000.000,00	252.318.721.703,00	226.872.205.630,00	89,91

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Simalungun

2. Realisasi Kinerja Anggaran Pendukung Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Realisasi Angaran Pendukung Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2020							
No	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Program**	**Anggaran Sebelum Perubahan**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi**	**%**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Misi 1 : **Percepatan Pembangunan Infrastruktut**							
1	Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan irigasi	Panjang jalan dalam kondisi baik	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	84.472.682.000	21.791.722.100	21.389.706.400	98
			Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	630.000.000	617.870.000	616.595.000	99
			rogram Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	15.000.000.000	6.000.000.000	5.999.324.982	99
		Kondisi irigasi dalam keadaan baik dan sedang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	290.000.000	265.000.000	262.120.750	95
2	Meningkatnya akses pelayanan air bersih	Persentase cakupan pelayanan air minum	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	19.136.504.000	15.502.091.688	15.286.278.812	98
Misi Kedua : Peningkatan Kesehatan Masyarakat							
3	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dasar	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi (32 Kecamatan)	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	3.154.250.000	3.154.250.000	1.131.425.000	35,87
4	Terwujudnya pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase peserta BPJS kesehatan non PBI dan Mandiri	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan kesehatan Nasional BJS Kesehatan	16.795.250.961	13,695,250,961	13,586,746,500	99.21
			Jaminan KesehatanNasional (JKN)	2.727.900.000	940,900,000	578,200,000	61.45
5	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	4.007.932.000	3.610.662.368	1.120.775.981	31.04
6	Terlaksananya pelayanan imunisasi bagi anak usia 0-11 bulan	Meningkatnya persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular	2.514.059.300	1,564,002,733	1,513,497,209	96.77

7	Meningkatnya kinerja pelayanan KB	Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi Akseptor KB	Program Keluarga Berencana	10.381.545.000	9.399.935.000	5.155.954.780	54,43
			1. Program Pelayanan Kontrasepsi, Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	198.740.000	35.877.000	35.877.000	100
			2. Program Pelayanan KB medis operasi	241.940.000	0	0	0
		Sarana Penyuluh KB yang tersedia di Kecamatan	1. Progam Penyediaan sarana Penyuluh KB	0	0	0	0
Misi Ketiga : Pengembangan dan Pemerataan Akses Pembangunan SDM							
8	Meningkatnya kualitas sarana pendidikan	Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik dan sedang (SD,SMP)	Program Pendidikan Wajar 9 Tahun	15.919.427.000	14.070.599.000	13.957.245.622	99,19
9	Meningkatnya kualifikasi pendidikan guru	Tingkat kualifikasi pendidikan guru PAUD, SD dan SMP	Program Peningkatan Mutu Tendik	2.765.000.000	608.711.000	608.621.000	99,9
10	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai rata-rata ujian Nasional (SD/SMP)	Program Peningkatan Nilai Mutu Ujian Nasional	0	0	0	0
11	Meningkatnya angka parsipasi sekolah	Persentase APK sekolah TK/PAUD	Program Pendidikan PAUD	1.434.000.000	441.740.00	432.440.000	97,89
		Persentase APM SD/ MI	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				
		Persentase APM SMP		5.415.000.000	713.200.000	712.745.800	99,94
12	Meningkatnya minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan (1 Tahun)	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	230.000.000	31.840.000	31.840.000	100
Misi Keempat : Menjamin Ketentraman Masyarakat							
13	Meningkatnya keamanan/ketertiban masyarakat serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelaksanaan patroli penegakan Perda di wilayah kecamatan	Program Peneggakan Kepatuhan Perda di wilayah Kecamatan				
		Kejadian/insiden disebabkan oleh SARA	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	40.000.000	0	0	0
		Terbinanya Ormas dan LSM					
Misi Kelima : Meningkatkan Daya Saing							
14	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Evaluasi LPPD	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	50.000.000	5.000.000	0	0
		Nilai Evaluasi LAKIP	Program Peningkatan Hasil Evaluasi LAKIP	0	0	0	0
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	3.597.600.000	2.954.200.000	1.711.720.947	57,94

			Program Manajemen Barang Milik Daerah	3.160.000.000	2.071.900.000	1.125.775.100	54,34
		Persentase OPD dalam kegiatan pengawasan internal secara berkala	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	14.959.958	14.959.958	100
			2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	75.000.000	20.000.000	19.910.000	99,55
		Ketepatan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	422.762.500	182.920.300	63.995.000	34,99
		Persentase dokumen pelayanan perizinan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	1. Program Perumusan Kebijakan Pelayanan Perijinan	80.000.000	30.000.000	29.000.000	96.67
		Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil Akte Kelahiran (0-18) Tahun	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2104193000	1.797.958.500	1.099.516.589	61,15
		Meningkatnya tertib administrasi dokumen kependudukan (e-KTP)					
		Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	233.354.000	233.354.000	233.354.000	100
			Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100
			Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100
15	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase kenaikan penerimaan PAD	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	130.000.000	9.000.000	9.000.000	100
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.505.600.000	289.926.000	289.398.000	99,82
			3. Program Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	510.000.000	470.000.000	431.620.000	91,83
16	Meningkatnya kesempatan kerja dan berkembangnya usaha koperasi/Industri Kecil Menengah	Persentase koperasi yang aktif	Program Pengembangan Kewirausahawan dan Keunggulan Kompetitif Usaha KeciMenengah	200.000.000	59.696.600	59.666.600	99,95
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	73.000.000	67.250.000	67.250.000	100
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	196.884.000	38.203.000	38.203.000	100

		Persentase pelaku IKM yang mendapatkan pelatihan dan bantuan peralatan	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	493.200.000	336.580.000	334.694.800	99,44
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	929.100.000	196.879.000	180.829.000	91,85
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	606.300.000	30.700.000	30.700.000	100
			Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	848.440.000	86.265.000	86.264.900	100
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.858.750.000	1.179.671.100	1.178.421.100	99,89
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	655.560.000	116.106.222	101.202.694	87,16
17	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	96.000.000	0	0	0
		Persentase penanganan kasus-kasus lingkungan hidup	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	0	0	0	0
18	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase penanganan kekerasan anak dan perempuan yang dilayani	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	66.000.000	0	0	0
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Anak	120.000.000	0	0	0
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam Pembangunan	54.000.000	0	0	0
19	Meningkatnya kinerja pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagori/desa	Jumlah pembinaan ke nagori dalam pengelolaan ADD dan DD	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	80,965,000	77,915,000	77,915,000	100.00
		Jumlah PKK yang aktif di nagori untuk untuk memberdayakan 10 Program Pokok PKK	Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa	500,000,000	135,348,400	135,061,900	99.79
20	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	194.850.000	0	0	0
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	45.000.000	35.805.000	25.864.400	72,24
			Program Pencegahan dan Penanggulang Penyakit Ternak	131.250.000	0	0	0
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	19.800.000	0	0	0

			Program Pemasaran Hasil Perikanan	18.800.000	0	0	0
21	Meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah bidang pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan unggulan, Padi, Ubi, Jagung	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1.335.007.100	698.680.000	689.504.000	98,69
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.721.458.000	1.891.197.900	489.485.900	98,69
		Jumlah produksi hortikultura unggulan; Cabai	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	544.500.000	77.344.000,00	72.469.000,00	93,7
		Jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	7.505.725.000,00	3.105.475.000,00	3.104.612.500,00	99,97
		Sawit, Karet, Kopi	Program Peningkatan Penerapan eknologi Pertanian/Perkebunan	678.271.975,00	678.271.975,00	675.825.725,00	99,64
22	Meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah bidang pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.310.150.000	220.724.900	220.211.700	99,77
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.498.975.000	1.011.850.000	922.842.350	91,2
			Program Pengembangan Kemitraan	941.404.000	1.151.368.000	995.636.800	86,47
		Jumlah kunjungan wisatawan lokal	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	361.000.000	111.000.000	54.743.000	49,32
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	257.275.000	0	0	0
			Program Pengembangan Nilai Budaya	. 1.283.000.000	0	0	0
	Jumlah			223.303.439.836	95.274.044.611	81.397.628.190	64,653

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran kinerja didasarkan pada tingkat pencapaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja termasuk pada capaian kinerja keuangan pendukung sasaran strategis. Adapun persentase hasil pengukuran kinerja dari setiap indikator kinerja dan capaian realisasi keuangan pendukung sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1) Capaian indikator kinerja dengan kategori **Sangat Baik** sebanyak 3 (tiga) indikator atau sebesar **7,14%.**
2) Capaian indikator kinerja dengan kategori **Baik** sebanyak 25 (dua puluh lima) indikator kinerja atau sebesar **59,52%.**
3) Capaian indikator kinerja dengan kategori **Cukup** sebanyak 4 (empat) indikator kinerja atau sebesar **9,52%.**
4) Capaian indikator kinerja dengan kategori **Kurang/sangat kurang** sebanyak 5 (lima) indikator kinerja atau sebesar **11,90%.**
5) 2 (dua) indikator kinerja tidak terealisasi dan 3 (tiga) indikator kinerja masih dalam proses.
6) Anggaran pendukung 22 (dua puluh dua) sasaran strategis dan 42 (empat puluh enam) indikator kinerja sebesar Rp. 77.278.033.502,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 67.296.394.866,00,- atau 87%.

Berdasarkan pengukuran kinerja, bahwa secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun selama tahun 2020 dapat tercapai, walaupun masih ada ada beberapa indikator kinerja perlu ditingkatkan kinerjanya. Beberapa indikator yang belum tercapai antara lain disebabkan keterbatasan anggaran sehingga beberapa kegiatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan.Beberapa indikator yang belum tercapai akan menjadi prioritas pada tahun anggaran berikutnya. Untuk alokasi anggaran

pendukung sasaran strategis walaupun dari sisi jumlah anggaran berkurang, serta diikuti dari sisi pencapaian realisasi adanya penurunan yaitu terealisasi sebesar 87 %, dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 hanya terealisasi sebesar 90,37 %. Kondisi ini dipengaruhi adanya pandemi Covid-19, anggaran dialihkan untuk penangulangan dan pencegahan yang dapat menghambat kinerja karena minimnya dukungan anggaran. Oleh karena itu, untuk ke depannya proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pendukung sasaran strategis harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Pamatang Raya, Maret 2021

BUPATI SIMALUNGUN,

Dr. J.R. SARAGIH, SH, MM